



LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**
Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I	: PENDAHULUAN 1
	1.1 Latar Belakang 1
	1.2 Gambaran Umum 2
	1.3 Isu – Isu Strategis 19
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA 23
	2.1 Rencana Strategis 23
	2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 27
	2.3 Perjanjian Kinerja 37
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA 59
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi 59
	3.2 Realisasi Anggaran 94
BAB IV	: PENUTUP 166
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan14

TABEL 1.2 : Keadaan pegawai berdasarkan golongan 15

TABEL 1.3 : Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sukoharjo 15

TABEL 1.4 : Jenis dan jumlah sarana pelayanan kesehatan di
Kabupaten Sukoharjo 16

TABEL 1.5 : Jumlah fasilitas / aset Dinas Kesehatan Kab.Sukoharjo17

TABEL 1.6 : Data 10 besar penyakit di Kabupaten Sukoharjo 18

TABEL 2.1 : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026 26

TABEL 2.2 : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 37

TABEL 2.3 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan
Kab. Sukoharjo Tahun 202438

TABEL 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah 59

TABEL 3.2 : Pengukuran Capaian Kinerja AHH Tahun 2024 61

TABEL 3.3 : Perbandingan Realisasi AHH Tahun 2024 dengan
Tahun Sebelumnya62

TABEL 3.4 : Perbandingan Realisasi AHH Tahun 2024 dengan
Target Akhir Renstra 62

TABEL 3.5 : Perbandingan Realisasi AHH Tahun 2024 dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 63

TABEL 3.6 : Capaian AHH Provinsi di Indonesia Tahun 2024 63

TABEL 3.7 : Anggaran Program yang Menunjang Keberhasilan
Kinerja Dinas Kesehatan68

TABEL 3.8 : Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 71

TABEL 3.9 : Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	74
TABEL 3.10 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	77
TABEL 3.11 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Kabupaten Lain	80
TABEL 3.12 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target Nasional	82
TABEL 3.13 : Realisasi Anggaran Program Dinas Kesehatan Tahun 2024	95
TABEL 3.14 : Anggaran Pendapatan	95
TABEL 3.15 : Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024	96
TABEL 3.16 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	108
TABEL 3.17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	165

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024. LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo, Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 197009021991032005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya angka kesakitan dan kematian.”

Diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup terealisasi 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 64,89%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 128,09 % sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 63,2%.

- b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,1 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 11,13 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 43,24%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 71,25 % sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 28,01%.

- c. Angka Kematian Balita (AKABa)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024sebesar 8,3 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 12,29 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 51,93%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 66,43% sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan 14,5%.

- d. Stunting

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,6% terealisasi 9,5% dengan capaian kinerja 75%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 109,09% sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan 34,09%.

- e. Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 95% terealisasi 129,20% dengan persentasi capaian sebesar 136%, Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%

sehingga capaian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 36%.

- f. Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 69% terealisasi 86,50% dengan capaian kinerja 125,36% Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian tahun 2024 mengalami peningkatan 25,36%.

- g. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 45% terealisasi 70,5% dengan capaian kinerja 156,67%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian di tahun 2024 mengalami peningkatan 56,6%.

Capaian indikator dimaksud didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

- 2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP. Target capaian indikator sasaran tahun 2024 target 77 belum dilaksanakan penilaian, adapun target tahun 2023 sebesar 76 terealisasi sebesar 96,18 dengan capaian 126,55%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100% sehingga capaian di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 26,55%. Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ke depan yaitu:

- 1. Pada tataran nasional, diinisiasi 6 pilar transformasi kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Transformasi layanan primer
 - b. Transformasi layanan rujukan

- c. Transformasi sistem ketahanan kesehatan
 - d. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
 - e. Transformasi teknologi kesehatan
 - f. Transformasi SDM kesehatan
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo.
 3. Pemenuhan sarana prasarana dalam pelaksanaan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sukoharjo.
 4. Ketersediaan data dan informasi kesehatan yang lengkap, valid, aktual dan berkesinambungan serta mudah diakses.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pemerataan pembangunan kesehatan merupakan kewajiban dari pemerintah namun tentunya tidak lepas dari peran sektor swasta.

Guna mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggung jawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.2 Gambaran Umum

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- 5) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Sukoharjo memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f) penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) **Subbagian Perencanaan** , dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

- b) **Subbagian Keuangan**, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan.
- c) **Subbagian Umum dan Kepegawaian**, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait promosi kesehatan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi, serta kemitraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) perumusan petunjuk teknis kegiatan meliputi promosi kesehatan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
- b) pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan teknis meliputi promosi kesehatan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;

- c) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan meliputi promosi kesehatan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- d) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- e) pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas meliputi promosi kesehatan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; dan
- f) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh:

- a) **Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi promosi kesehatan, advokasi, pemberdayaan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif.

- b) **Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang terkait dengan kesehatan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat.
- c) **Sub Koordinator Kemitraan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan menjalin kerja sama kemitraan dalam bidang kesehatan dengan pemerintah, swasta maupun pihak lain dan penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang terkait dengan kemitraan masyarakat.

3) **Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, farmasi, makanan minuman, perbekalan kesehatan, pemeliharaan sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) perumusan petunjuk teknis kegiatan meliputi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian, perizinan, sertifikasi dan pengawasan di bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
- b) pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan teknis meliputi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian, perizinan, sertifikasi dan pengawasan di bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;

- c) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian perizinan, sertifikasi dan pengawasan di bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
- d) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan meliputi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian perizinan, sertifikasi dan pengawasan di bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
- e) pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas meliputi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian perizinan, sertifikasi dan pengawasan di bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi; dan
- f) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibantu oleh:

- a) **Sub Koordinator Fasilitas Pelayanan Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait pengadaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan, dan pengadaan alat kesehatan.
- b) **Sub Koordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait pelaksanaan pelayanan kefarmasian, makanan minuman, perizinan, sertifikasi dan pengawasan di bidang farmasi dan alat kesehatan.

- c) **Sub Koordinator Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi terkait rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.

4) Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a) perumusan petunjuk teknis kegiatan meliputi penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan;
- b) pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan teknis meliputi penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan;
- d) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan meliputi penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan;
- e) pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penyediaan pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan; dan

- f) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh:

- a) **Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- b) **Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c) **Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait penyediaan layanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

5) Bidang Mutu, Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pemberian rekomendasi dan/atau izin tenaga kesehatan, pemberian sertifikat standar fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya, pembinaan dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, perencanaan, pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) perumusan petunjuk teknis kegiatan meliputi pemberian rekomendasi dan/atau izin tenaga kesehatan, pengendalian dan pengawasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan; akreditasi fasilitas kesehatan; pemenuhan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
- b) pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan teknis meliputi pemberian rekomendasi dan/atau izin tenaga kesehatan, pengendalian dan pengawasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan; akreditasi fasilitas kesehatan; pemenuhan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan meliputi pemberian rekomendasi dan/atau izin tenaga kesehatan, pengendalian dan pengawasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan; akreditasi fasilitas kesehatan; pemenuhan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
- d) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan meliputi pemberian rekomendasi dan/atau izin tenaga kesehatan, pengendalian dan pengawasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan; akreditasi fasilitas kesehatan; pemenuhan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
- e) pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pemberian rekomendasi dan/atau izin tenaga kesehatan, pengendalian dan pengawasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan; akreditasi fasilitas kesehatan; pemenuhan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan; dan

- f) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Mutu, Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibantu oleh:

- a) **Sub Koordinator Perizinan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lainnya** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan pemberian izin praktik tenaga kesehatan.
- b) **Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan.
- c) **Sub Koordinator Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait perencanaan, pembinaan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan.

6) Unit Organisasi Bersifat Khusus

Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi yang di dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.

7) Unit Organisasi Bersifat Fungsional

Unit organisasi bersifat fungsional adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas yang memberikan layanan secara profesional.

8) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana tugas teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022, susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang;
 - a) Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b) Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c) Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - d) Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 4) Unit Organisasi Bersifat Khusus;

Unit Organisasi bersifat Khusus dibawah Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yaitu RSUD Ir Soekarno.
- 5) Unit Organisasi Bersifat Fungsional;

Unit Organisasi bersifat fungsional dibawah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yaitu :

 - a) Puskesmas Weru;
 - b) Puskesmas Bulu;

- c) Puskesmas Tawang Sari;
- d) Puskesmas Nguter;
- e) Puskesmas Sukoharjo;
- f) Puskesmas Bendosari;
- g) Puskesmas Polokarto;
- h) Puskesmas Mojolaban;
- i) Puskesmas Grogol;
- j) Puskesmas Baki;
- k) Puskesmas Gatak;
- l) Puskesmas Kartasura.

6) Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Unit Pelaksana teknis daerah dibawah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**

```

graph TD
    KD[Kepala Dinas] --- S[Sekretaris]
    KD --- KSBU[Kepala Sub Bag. Umum, Kepegawaian]
    KD --- KSBP[Kepala Sub Bag. Perencanaan]
    KD --- KSBK[Kepala Sub Bag. Keuangan]
    
    KSBU --- KB[Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat]
    KSBU --- KB2[Kepala Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan]
    KSBU --- KB3[Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat]
    KSBU --- KB4[Kepala Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan]
    
    KB --- SKM1[Sub Koordinator Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat]
    KB --- SKM2[Sub Koordinator Kesehatan Keluarga & GIZI]
    KB --- SKM3[Sub Koordinator Kesehatan Remaja]
    
    KB2 --- SKF1[Sub Koordinator Fasilitas Pelayanan Kesehatan]
    KB2 --- SKF2[Sub Koordinator Farmasi, Makanan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan]
    KB2 --- SKF3[Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan]
    KB2 --- SKF4[Sub Koordinator Perencanaan, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi Kesehatan]
    
    KB3 --- SKP1[Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan]
    KB3 --- SKP2[Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat]
    KB3 --- SKP3[Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga]
    
    KB4 --- SKM4[Sub Koordinator Keperawatan]
    KB4 --- SKM5[Sub Koordinator Keperawatan]
    KB4 --- SKM6[Sub Koordinator Keperawatan]
    
    KB1 --- SKM1
    KB1 --- SKM2
    KB1 --- SKM3
    
    KB2 --- SKF1
    KB2 --- SKF2
    KB2 --- SKF3
    KB2 --- SKF4
    
    KB3 --- SKP1
    KB3 --- SKP2
    KB3 --- SKP3
    
    KB4 --- SKM4
    KB4 --- SKM5
    KB4 --- SKM6
    
    SKM1 --- UPTD1[UPTD]
    SKM2 --- UPTD2[UPTD]
    SKM3 --- UPTD3[UPTD]
    
    SKF1 --- UPTF1[UPTF]
    SKF2 --- UPTF2[UPTF]
    SKF3 --- UPTF3[UPTF]
    SKF4 --- UPTF4[UPTF]
    
    SKP1 --- UOBK1[UOBK]
    SKP2 --- UOBK2[UOBK]
    SKP3 --- UOBK3[UOBK]
    
    SKM4 --- UPTD4[UPTD]
    SKM5 --- UPTD5[UPTD]
    SKM6 --- UPTD6[UPTD]
    
    SKM4 --- UPTD4
    SKM5 --- UPTD5
    SKM6 --- UPTD6
  
```

KEPALA DINAS
 DR. TITI KAHAPU, S.E.M., M.Kes.
 NIP. 19700903 199302 2 005 (N/2)

SEKRETARIS
 Y. ENDIK PRADITJO SURHARJO, S.P.
 NIP. 19670504 198808 2 002 (N/2)

KEPALA SUB BAG. UMUM, KEPENGAWAIAN
 MARCEVO, S.E.M., M.Si.
 NIP. 19640204 198311 2 003 (N/2)

KEPALA SUB BAG. PERENCANAAN
 BORMAN BUDI KARYOTO, S.G., M.Mg.
 NIP. 19681014 198908 2 002 (N/2)

KEPALA SUB BAG. KEUANGAN
 WIDYANISH, S.E., BA. MAN.
 NIP. 19630404 198903 2 002 (N/2)

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
 DR. HARYANTI, S.ST.
 NIP. 19751228 199302 2 001 (N/2)

KEPALA BIDANG KEFARMASIAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
 BEO BAHARU, S.E.M., M.Mg.
 NIP. 19710611 199403 2004 (N/2)

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 dr. SUCENG TRIHONO
 NIP. 19700705 201406 2 005 (N/2)

KEPALA BIDANG MUTU TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
 SUTARMI, S.E.M., M.Si.
 NIP. 19500608 198003 2 002 (N/2)

SUB KOORDINATOR PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 ANIK HASTARI, S.Kep.
 NIP. 19700818 199003 2 008 (N/2)

SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA & GIZI
 MARIA AGUSTINATI, S.T., M.Mg.
 NIP. 19710802 199103 2 007 (N/2)

SUB KOORDINATOR KESEHATAN REMAJA
 AGUSTINI SUPRIANDATNA, S.Esp., M.Kep.
 NIP. 19800302 201001 2 024 (N/2)

SUB KOORDINATOR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
 SRI UTAMI, S.E.M., M.Mg.
 NIP. 19720108 199403 2008 (N/2)

SUB KOORDINATOR FARMASI, MAKANAN MINUMAN, DAN PERBEKALAN KESEHATAN
 SUPANTO, S.Esp., Apt.
 NIP. 19680204 201001 2 006 (N/2)

SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 dr. APRILIA THERESIA NTE
 NIP. 19700403 201801 2 002 (N/2)

SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN
 dr. APRILIA THERESIA NTE
 NIP. 19700403 201801 2 002 (N/2)

SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 IRMA HUSNANE, S.E.M., M.P.H.
 NIP. 19740602 200904 2 005 (N/2)

SUB KOORDINATOR KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
 HARJANTO SUPRIANDATNO, S.E.M.
 NIP. 19600301 200903 2 007 (N/2)

SUB KOORDINATOR KEPERAWATAN
 dr. FUSILO RUGHOHO SETIYAN L.
 NIP. 19740812 199102 2 000 (N/2)

SUB KOORDINATOR KEPERAWATAN
 dr. FUSILO RUGHOHO SETIYAN L.
 NIP. 19740812 199102 2 000 (N/2)

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN, PEMBIAYAAN DAN PINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 NUNIK SUSILOWATI, S.E.M.
 NIP. 19771219 200002 2 010 (N/2)

UPTD **UPTF** **UOBK**

Keterangan:
 - - - - - : Garis Pembatas
 - - - - - : Garis Koordinasi

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo beserta 1 UPTD Labkesda dan 12 Puskesmas pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1162 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan dan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	URAIAN	TAHUN				KET	
		2021	2022	2023	2024	L	P
1.	PENDIDIKAN					2024	2024
	Pasca Sarjana	40	40	30	38	8	30
	Sarjana	243	325	328	299	54	245
	Diploma (D1,D3)	620	724	711	789	73	716
	SMA/SMK	75	52	41	29	13	16
	SMP/MTs	6	6	6	4	3	1

No	URAIAN	TAHUN				KET	
		2021	2022	2023	2024	L	P
	SD/MI	3	3	3	3	3	0

2) Pegawai berdasarkan golongan

Tabel 1.2 Keadaan pegawai berdasarkan golongan

No	URAIAN	TAHUN				KET	
		2021	2022	2023	2024	L	P
1.	GOLONGAN					2024	2024
	Golongan I	3	3	3	3	3	0
	Golongan II	317	316	187	301	41	260
	Golongan III	641	659	759	753	87	666
	Golongan IV	105	113	109	107	25	82

Sedangkan jumlah seluruh tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5.953 orang berdasarkan jenis tenaga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Uraian	Tahun				Ket
		2021	2022	2023	2024	
1.	Dokter Umum	486	469	459	488	orang
2.	Dokter Spesialis	309	314	332	352	orang
3.	Dokter Gigi	85	85	103	114	orang
4.	Perawat	2489	2359	2360	2393	orang
5.	Bidan	818	788	757	761	orang
6.	Tenaga Farmasi	1115	850	946	1022	orang
7.	Tenaga Fisioterapi	132	134	136	149	orang

No	Uraian	Tahun				Ket
		2021	2022	2023	2024	
8.	Ahli Gizi	105	91	97	104	orang
9.	Analisis laboratorium	224	223	238	234	orang
10.	Ahli Rontgen	79	78	85	100	orang
11.	Ahli penyehatan lingkungan	61	61	56	64	orang
12.	Bidan Desa	167	167	167	172	orang
	TOTAL	6.070	5.619	5.736	5953	orang

e. Sarana dan Prasarana

Agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo berkualitas, diperlukan sarana pelayanan kesehatan yang memadai. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari sarana pelayanan kesehatan, sarana industri farmasi dan sarana distribusi kesehatan. Adapun jenis dan jumlah sarana pelayanan kesehatan tersaji pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Jenis dan jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan	Tahun				Ket
		2021	2022	2023	2024	
1.	Sarana Pelayanan Kesehatan					
	Posyandu Balita	1194	1196	1201	1205	Kelompok
	Posyandu Lansia	1115	1116	1135	1146	Kelompok
	Puskesmas Induk	12	12	12	12	Unit
	Puskesmas Pembantu	47	47	47	47	Unit
	Puskesmas Keliling	79	79	79	79	Unit
	Puskesmas Rawat Inap	10	10	10	10	Unit
	Poliklinik Desa	167	167	167	167	Unit

Selain sarana dan prasarana tersebut, untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo didukung dengan fasilitas/aset sebagai berikut:

Tabel 1.5. Jumlah fasilitas / aset Dinas Kesehatan Kab.Sukoharjo

No	Fasilitas/ aset	Tahun				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1	Tanah	10	10	10	10	lokasi
2	Alat-alat besar	158	160	162	169	Unit
3	Alat-Alat Angkutan	220	201	186	175	Buah
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	314	309	309	316	Buah
5	Alat kantor dan rumah tangga	27184	28.872	24.815	25491	Buah
6	Alat - alat audio dan komunikasi	532	536	549	593	Unit
7	Alat- alat kedokteran	18.603	17.695	24.815	25100	Buah
8	Alat-alat laboratorium	3.537	3.650	3.595	3634	Buah
9	Bangunan Gedung	243	251	245	247	lokasi
10	Instalasi	22	24	24	27	Buah
11	Kendaraan Roda 2	151	145	132	119	Unit
12	Kendaraan Roda 4	47	56	54	56	Unit
13	Buku dan Perpustakaan	220	220	220	0	buah
14	Alat Pertanian (Spayer)	64	64	64	64	unit

No	Fasilitas/ aset	Tahun				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
15	Komputer	2.017	2.098	2.155	2292	unit
16	Alat keselamatan kerja	11	14	14	15	unit

f. Permasalahan Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo yang tergambar dari data 10 besar penyakit sebagai berikut:

Tabel 1.6. Data 10 besar penyakit di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Penyakit	Th 2021	Jenis Penyakit	Th 2022	Jenis Penyakit	Th 2023	Jenis Penyakit	Th 2024
1.	Diare/ Gastroenteristis	66984	Diare/ Gastronteristis	79118	ISPA	51352	Commmon Cold	60.743
2.	Commmon Cold	27714	Isipa	68592	Commmon Cold	44672	Acute upper respiratory infection	58.574
3.	Myalgia	24773	Commmon Cold	36745	Low Back Pain	44458	Myalgia	30.345
4.	Hipertensi Stage 1	22382	Diabetes Mellitus Non Spesialtic	26454	Hipertensi	22754	Essential Hipertensi	26.590
5.	Diabetes Mellitus Non Spesialtic	20297	Myalgia	21593	Headache	18154	Dyspepsia	24.176
6.	Corona Virus 19	15354	Dispepsia	20426	Diabetes Mellitus	10835	Fever, unspecified	21.137
7.	Headache	13721	Chronic Kidney Disesae Grade 5	17903	Acute Pharyngitis	9891	Supervition of other normal pregnancy	15.855
8.	Gastritis	10824	Hipertensi Stage 2	17520	Demam	9745	Headache	14.605
9.	Panas/Febris	8864	Low Back Pain	16347	Gastroente ritis Acute	8604	Gastritis	10.835
10.	Hipertensi Stage 2	3775	Hipertensi Heart Disease	14821	Hipertensi Heart Disease	8212	Need for immunization againstpoliomyelitiss	10.112

1.3 Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu menyusun kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera;
2. Membentuk tata kehidupan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, menuju kemandirian;
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dengan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Mewujudkan kualitas sumber daya kesehatan yang professional.

Adapun permasalahan utama Dinas Kesehatan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Sukoharjo, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, kematian balita dan stunting pada balita;
2. Masih adanya kasus penyakit menular dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;
3. Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar;
4. Masih rendahnya indeks keluarga sehat di Kabupaten Sukoharjo;
5. Tata kelola pemerintahan yang belum akuntabel.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- d. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- i. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3. ISU STRATEGIS

1.4 LANDASAN HUKUM

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

a. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021–2026 adalah **“Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”** dengan slogan MAKMUR yang juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi. Sebagai upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
- 3) Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mendukung misi ke-2 yakni **“ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

b. Tujuan dan Sasaran

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup” .

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup maka sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- 1) Menurunnya angka kesakitan dan kematian dan dengan indikator sasaran :
 - a) AKI (Angka Kematian Ibu)
 - b) AKB (Angka Kematian Bayi)
 - c) AKABA (Angka Kematian Balita)
 - d) Stunting
 - e) Persentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - f) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - g) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan

2) Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator sasaran:

a) Nilai SAKIP

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo beserta target indikator kinerja yang akan dicapai disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat		Angka Harapan hidup	tahun	77,65	77,70	77,75	77,8	77,85	77,9
1.1		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	97	96	95	94	93	92
			AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 KH	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9
			AKABA (Angka Kematian Balita)	Per 1.000 KH	8,5	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1
			Persentase Stunting	%	7,75	7,7	7,65	7,6	7,55	7,5
			Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
			Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	62	64	66	69	72	75
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan	%	21	27	36	45	54	65
1.2		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public	Nilai Sakip	Poin	72	75	76	77	78	80

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seperti yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah " Mewujudakan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur", maka program dan kegiatan sesuai pemetaan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 terdiri dari :

a. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1.4.1 Pengadaan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian

1.4.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan

1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9 Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan :

1.9.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Weru

1.9.2 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bulu

1.9.3 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Tawang Sari

1.9.4 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nguter

1.9.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sukoharjo

1.9.6 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Bendosari

1.9.7 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Polokarto

1.9.8 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Mojolaban

1.9.9 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Grogol

1.9.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baki

1.9.11 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gatak

1.9.12 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kartasura

1.9.13 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

2.1.1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

2.1.2 Pengembangan Puskesmas

2.1.3 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

2.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Lainnya

2.1.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.1.6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

2.1.7 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.1.8 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

2.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

2.2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

2.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

2.2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

2.2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

2.2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

2.2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

2.2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

2.2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

2.2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

- 2.2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 2.2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 2.2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 2.2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 2.2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 2.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 2.2.17 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2.2.18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- 2.2.19 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 2.2.20 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 2.2.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 2.2.22 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 2.2.23 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 2.2.24 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- 2.2.25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional
- 2.2.26 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 2.2.27 Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 2.2.27.1 Operasional Pelayanan Puskesmas Weru
 - 2.2.27.2 Operasional Pelayanan Puskesmas Bulu

- | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 2.2.27.3 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Tawang Sari | | |
| 2.2.27.4 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Nguter | | |
| 2.2.27.5 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Sukoharjo | | |
| 2.2.27.6 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Bendosari | | |
| 2.2.27.7 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Polokarto | | |
| 2.2.27.8 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Mojolaban | | |
| 2.2.27.9 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Grogol | | |
| 2.2.27.10 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Baki | | |
| 2.2.27.11 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Gatak | | |
| 2.2.27.12 | Operasional | Pelayanan | Puskesmas |
| | Kartasura | | |
- 2.2.28 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2.2.29 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 2.2.30 Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 2.2.31 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 2.2.32 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 2.2.33 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

2.2.34 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

2.2.35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

2.2.36 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

2.2.37 Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

2.2.38 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

2.3 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

2.3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

2.3.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

2.3.3 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

3.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

3.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1.3.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kesehatan sesuai Standar

3.3.1 Pembinaan dan pengawasan Sumber daya
Manusia Kesehatan

3.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

3.3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan
Minuman**

4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

4.1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan:

1.3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4.3 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan:

4.3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

4.4 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan:

4.4.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

5.1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

5.2.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

5.3.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Target dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta perencanaan penganggaran tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	AKI (Angka Kematian Ibu)	94/100.000KH
		AKB (Angka Kematian Bayi)	7,1/1.000 KH
		AKABA (Angka Kematian Balita)	8,3/1.000 KH
		Persentase Stunting	7,6%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	≥ 95%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	69%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan	45%
2.	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	77 poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	99.270.948.988,00	APBD/DAK /DBHCHT (DKK,RSUD,Pusk esmas)
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.	1.589.607.400,00	APBD/ DAK (DKK)
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.	607.273.600,00	APBD/ DAK /DBHCHT (DKK)
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	1.363.514.600,00	APBD/DAK (DKK,Puskesmas)
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	334.485.996.514,00	APBD/DAK (DKK,BLUD RSUD, BLUD Puskesmas)
JUMLAH ANGGARAN		437.317.341.102,00	

Adapun penjabaran dalam program dan kegiatan tersaji dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	334.485.996.514
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50.000.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja -PD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	10.000.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-dan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
			Dokumen Perubahan RKA- SKPD		
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	157.885.941.000
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1452 Orang/ bulan	157.012.061.000
	8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000 Dokumen	873.880.000
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	131.400.000
	9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000
	10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	116.400.000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	74.960.000
	11	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1 Dokumen	54.600.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
		Administrasi Kepegawaian			
	12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	3.150.000
	13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	13.610.000
	14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	3.600.000
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	660.455.800
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.214.500
	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	82.670.500
	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	289.318.000
	18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	56.484.800
	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4.728.000
	20	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	9.900.000
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	167.140.000
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	20.900.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
			Pemerintahan Daerah		
	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	900.000
	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.537.745.900
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 laporan	13.319.900
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	500.598.000
	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.023.828.000
H	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	680.846.216
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	60.000.000
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	118.126.316

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 unit	60.150.000
	30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	48.810.000
	31	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	348.869.900
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	44.890.000
I	Peningkatan pelayanan BLUD		Persentase pelayanan BLUD	100%	173.443.747.598
	33	Pelayanan BLUD Puskesmas Weru	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Weru	12 bulan	4.467.761.320
	34	Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu	12 bulan	3.303.547.687
	35	Pelayanan BLUD Puskesmas Tawangsari	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Tawangsari	12 bulan	5.057.383.687
	36	Pelayanan BLUD Puskesmas Nguter	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Nguter	12 bulan	4.342.388.665
	37	Pelayanan BLUD Puskesmas Sukoharjo	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Sukoharjo	12 bulan	5.107.667.392
	38	Pelayanan BLUD Puskesmas Bendosari	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Bendosari	12 bulan	3.388.310.311
	39	Pelayanan BLUD Puskesmas Polokarto	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Polokarto	12 bulan	5.854.206.025
	40	Pelayanan BLUD Puskesmas Mojolaban	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Mojolaban	12 bulan	4.903.802.034
	41	Pelayanan BLUD Puskesmas Grogol	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Grogol	12 bulan	4.908.876.730

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
	42	Pelayanan BLUD Puskesmas Baki	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Baki	12 bulan	3.978.393.420
	43	Pelayanan BLUD Puskesmas Gatak	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Gatak	12 bulan	3.465.244.456
	44	Pelayanan BLUD Puskesmas Kartasura	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Kartasura	12 bulan	4.421.265.871
	45	Pelayanan BLUD RSUD Ir Soekarno	Operasional Pelayanan BLUD RSUD Ir. Soekarno	12 bulan	120.244.900.000
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				99.270.948.988
			NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	35%	
			Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Bayi	100%	
			Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Ibu	100%	
			Persentase Capaian UHC	95%	
			Persentase Fasyankes Lainnya Terakreditasi	80%	
			Persentase Fasyankes yang Memberikan Layanan JKN	52%	
			Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) / RS terakreditasi	78%	
			Persentase FKTP Terakreditasi	32%	
			Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	84%	
			Persentase Puskesmas dengan Cakupan	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
		Pelayanan Kesehatan Balita		
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja	75%	
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	89%	
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Olahraga	100%	
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Kesehatan Reproduksi	100%	
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Lansia	100%	
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Imunisasi dan Surveilans	100%	
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	68%	
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
			Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Program Penyakit Menular	100%	
			Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100%	
J	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tingkat Ketersediaan Obat dan BMHP	100%	26.870.797.891
	46	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	6.231.000.000
	47	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 unit	3.112.350.000
	48	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	1.244.291.800
	49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya.	1 unit	80.000.000
	50	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	128.586.000
	51	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	61 unit	7.950.000.000
	52	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai dan Vaksin yang Disediakan	45 paket	7.795.586.091

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
		Fasilitas Kesehatan			
	53	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	480 unit	291.673.000
	54	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta obat, bmhp, vaksin, reagen ke Puskesmas	144 paket	37.311.000
K	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi	32%	71.608.976.825
			Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Terakreditasi	78%	
			Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Terakreditasi	80%	
			Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	30%	
			Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Potensi Bencana	100%	
			Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/Kelurahan)	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
		Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	90%	
		Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	100%	
		Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	100%	
		Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	100%	
		Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	98%	
		Imunisasi dasar lengkap	95%	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	
		Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100%	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	100%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	100%	
		Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	
		Persentase Kunjungan Bayi Baru Lahir	100%	
		Persentase Pelayanan Anak Balita	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100%	
			Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	7%	
			Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	10%	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Gizi	100%	
			Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	45%	
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(b)	81%	
	55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.715 Orang	54.714.800
	56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK Puskesmas)			680.460.000
	57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.183 Orang	25.278.000
	58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (BOK Puskesmas)			169.245.000
	59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.650 Orang	194.956.691
	60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BOK Puskesmas)			6.850.000
	61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	40.852 Orang	354.517.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
			Kesehatan Sesuai Standar		
	62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK Puskesmas)			50.625.000
	63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114.670 Orang	485.304.800
	64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK Puskesmas)			342.478.000
	65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580.262 Orang	21.160.000
	66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121.441 Orang	295.640.000
	67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	263.830 Orang	12.775.000
	68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.547 Orang	2.480.482.540
	69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.247 Orang	4.300.000
	70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.242 Orang	2.610.691.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
	71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK Puskesmas)			29.250.000
	72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14.791 Orang	390.818.000
	73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK Puskesmas)			19.800.000
	74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	27.000.000
	75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	7.583.378.000
	76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.300.825.530
	77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	25.000.000
	78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	60.100.000
	79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (BOK Puskesmas)			67.418.000
	80	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	7 Dokumen	337.427.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
		Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan		
	81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	8.895.000
	82	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	115.705.000
	83	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (BOK Puskesmas)			404.767.000
	84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	660 Orang	30.560.000
	85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang	43.166.000
	86	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	955.350.629
	87	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Puskesmas)			1.765.558.000
	88	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	45.118.814.160
	89	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	600 Orang	2.680.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
	90	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	119 paket	2.206.000
	91	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	70.500.000
	92	Operasional Pelayanan Puskesmas	JumlahDokumenOperasionalPelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.976.209.000
	93	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	199.249.877
	94	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (BOK Puskesmas)			201.855.000
	95	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	74 Unit	29.650.000
	96	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1.920.000
	97	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)(BOK Puskesmas)			4.100.000
	98	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9 Dokumen	12.600.800
	99	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah	1 Unit	724.351.328

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
			Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
	100	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.473 Orang	9.000.000
	101	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (BOK Puskesmas)			84.600.000
	102	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	142 orang	31.770.000
	103	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)(BOK Puskesmas)			3.750.000
	104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.000 orang	19.048.000
	105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	11 dokumen	157.975.000
	106	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	109.375.000
	107	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (BOK Puskesmas)			734.735.000
	108	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 dokumen	88.330.000
	109	Pengelolaan Sistem Informasi			71.761.670

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
		Kesehatan (BOK Puskesmas)			
L	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan ijin	100%	791.174.272
	110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	57 Unit	49.999.800
	111	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	134 Unit	124.752.400
	112	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	616.422.072
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	100%	1.589.607.400
M	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Sukoharjo	90%	75.032.200
	104	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.002 Dokumen	75.032.200

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
N	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM sesuai kebutuhan	95%	183.569.000
	105	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	69.063.000
	106	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Orang	3.660.000
	107	Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	110.846.000
O	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	90%	1.331.006.200
	108	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	1.331.006.200
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	86%	607.273.600
P	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	100%	114.107.800

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
			Tradisional) memiliki ijin operasional yang masih aktif		
	109	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	148 Dokumen	114.107.800
Q	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Sarana IRT yang dapat diterbitkan SPPIRT	100%	259.075.000
	110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen	259.075.000
R	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	100%	17.830.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
	111	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	17.830.000
S	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase jumlah sarana IRTP ber SPPIRT yang dibinwas	78%	216.260.800
	112	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	257 unit	216.260.800
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Desa siaga aktif mandiri	47%	1.363.514.600
T	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	58%	362.215.000
	113	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	13 Dokumen	362.215.000
U	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	90%	319.807.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4	5
	114	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11 Dokumen	319.807.000
V	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				681.492.600
			Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	92%	
			Persentase Posyandu Aktif Mandiri	58%	
	115	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen	441.534.800
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (BOK Puskesmas)			239.957.800

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	$91 \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66 \leq 75 \%$	Sedang
4.	$51 \leq 65 \%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan capaian Kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam Penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 maupun Rencana Strategis Dinas Kesehatan, yang meliputi indikator sebagai berikut:

a. Indikator Tujuan : Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah indikator statistik yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun seseorang diharapkan dapat

hidup sejak lahir, berdasarkan kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang berlaku di wilayah tertentu. AHH mencerminkan tingkat kualitas kesehatan masyarakat dan efektivitas layanan kesehatan yang ada.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sukoharjo merupakan **indikator tujuan** Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026. Perhitungan capaian kinerja AHH menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- 1) Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukoharjo.

Capaian AHH Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 tersaji pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja AHH Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Kategori	Sumber Data
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan yang meningkat	Angka Harapan Hidup	tahun	77,87	78,01	100,18	Sangat tinggi	BPS

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yaitu “Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat” dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup terealisasi pada tahun 2024 sebesar 78,01 dari target yang ditentukan sebesar 77,87. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **100,18 %** sehingga dapat dikategorikan **sangat tinggi**.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi AHH Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan yang meningkat	AHH	77,70	77,82	100,15	77,75	77,86	100,14	77,87	78,01	100.18

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian kinerja dari tahun 2022 – 2024 diatas 100%. Sehingga kinerja dalam pencapaian indikator AHH termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi AHH Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No.	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi (2024)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan yang meningkat	Angka Harapan Hidup	77,8	78,01	77,90	100,14

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi AHH Tahun 2024 dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Boyolali	76,12	76,23	76,44
2	Klaten	76,95	77,07	77,30
3	Sukoharjo	77,82	77,86	78,01
4	Wonogiri	76,41	76,56	76,84
5	Karanganyar	77,64	77,72	77,91
6	Sragen	75,87	75,97	76,18
7	Kota Magelang	77,02	77,22	77,53
8	Kota Surakarta	77,43	77,63	77,9
9	Kota Salatiga	77,72	77,93	78,26
10	Kota Semarang	77,69	77,9	78,24
	Provinsi Jawa Tengah	74,57	74,69	74,93
	Nasional	71,85	72,13	72,39

Sumber Data: BPS, 2024

Tabel 3.6. Capaian AHH Provinsi di Indonesia Tahun 2024

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	JAWA TENGAH	74,57	74,69	74,93
	Kota Salatiga	77,72	77,93	78,26
	Kota Semarang	77,69	77,9	78,24
	Kab. Sukoharjo	77,82	77,86	78,01
2	JAWA BARAT	73,52	73,8	74,07
	Kota Bekasi	75,48	75,79	76,12
3	D I YOGYAKARTA	75,08	75,12	75,22

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
	Kulon Progo	75,28	75,29	75,41
4	JAWA TIMUR	71,74	72,11	72,35
	Tulungagung	74,54	74,91	75,11
5	BALI	72,6	72,98	73,29
	Badung	75,51	75,88	76,18
6	KALIMANTAN TIMUR	74,62	74,72	75,03
	Kota Balikpapan	74,78	74,89	75,1

Sumber Data: BPS, 2024

Capaian AHH di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 74,93. Capaian AHH Kabupaten Sukoharjo sudah lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi. Di wilayah Karesidenan Surakarta yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali dan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo meraih AHH tertinggi sebesar 78,01. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lain di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat ketiga untuk pencapaian AHH setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Jika dibandingkan capaian Provinsi DI Yogyakarta, AHH Provinsi Jawa Tengah lebih rendah, namun Kabupaten Sukoharjo masih berada di atas capaian Provinsi DI Yogyakarta.

5) Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Angka Harapan Hidup merupakan perhitungan seseorang dapat bertahan hidup yang merupakan perkiraan statistik dan tidak menentukan berapa lama seseorang akan hidup secara individu.

Beberapa faktor pendorong yang berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan indikator Angka Harapan Hidup sebagai berikut:

- a) Tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,37% di Kabupaten Sukoharjo sehingga meningkatkan akses kesehatan yang lebih luas terutama pada masyarakat miskin.
- b) Tercapainya upaya pengendalian penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa.
- c) Tercapainya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar melalui akreditasi fasyankes maupun FKTL.
- d) Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di masyarakat serta pelayanan kesehatan pada seluruh cluster siklus hidup.
- e) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui digitalisasi Rekam Medis Elektronik dan integrasi data kesehatan melalui SATU SEHAT.
- f) Promosi pola hidup sehat di masyarakat melalui berbagai gerakan seperti Gerakan Bumil Sehat, Aksi Bergizi, Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas yang dilaksanakan di 12 kecamatan.
- g) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.

Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam pencapaian target sasaran diantaranya:

- a) Perubahan gaya hidup di masyarakat. Peningkatan konsumsi makanan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok meningkatkan prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan kanker.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya deteksi dini penyakit.

6) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 tidak terlepas dari dilaksanakannya Program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo diantaranya :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dalam penyediaan dukungan administrasi, teknis dan logistic untuk pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan sebagai berikut:
 - ✓ Peningkatan akses pelayanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar.
 - ✓ Pencegahan penyakit melalui deteksi dini penyakit pada individu dan mencegah komplikasi melalui pengobatan yang efektif.
 - ✓ Penyelenggaraan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat melalui kampanye kesehatan dan edukasi.
 - ✓ Penguatan sistem kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional sehingga seluruh penduduk

dapat mengakses pelayanan kesehatan termasuk penduduk miskin.

- ✓ Pengendalian penyakit menular dan tidak menular dengan melaksanakan program pengendalian, seperti pemberantasan nyamuk vektor demam berdarah, deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes, dan edukasi gaya hidup sehat sehingga dapat mengurangi insiden dan prevalensi penyakit.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan berperan dalam mendukung tersedianya tenaga kesehatan yang professional dan kompeten baik klinis maupun manajerial sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan melalui pelatihan dan pemerataan tenaga kesehatan.

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;

- Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman berperan dalam :
 - ✓ Pengendalian dan pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sehingga semua usaha yang bergerak di bidang kesehatan mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari produk atau layanan yang tidak aman dan tidak sesuai standar.
 - ✓ Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak

Lanjut Pengawasan sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit akibat konsumsi makanan dan minuman yang tercemar atau tidak aman serta berkontribusi dalam pencapaian gizi masyarakat yang optimal melalui konsumsi makanan yang sehat.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan berperan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang mandiri, berdaya, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Melalui edukasi dan penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan, gaya hidup sehat, dan pencegahan penyakit. Melalui program ini, masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat, seperti pola makan bergizi, olahraga teratur, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu dilakukan pula penguatan posyandu dan inisiasi Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif.

Anggaran Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Dinas Kesehatan tersaji pada tabel 3.7.

Tabel. 3.7 Anggaran Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	334.485.996.514
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.270.948.988
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.589.607.400

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	607.273.600
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.363.514.600
TOTAL ANGGARAN		437.317.341.102

b. Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU)

1) Capaian Indikator Kinerja Utama

Selain Indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Dinas Kesehatan mempunyai Indikator Kinerja Utama yang harus dipertanggungjawabkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a) Angka Kematian Ibu (AKI);
- b) Angka Kematian Bayi (AKB);
- c) Angka Kematian Balita (AKBa);
- d) Persentase Stunting;
- e) Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- f) Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- g) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan; dan
- h) Nilai SAKIP.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan pedoman sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah

pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan metode perhitungan capaian per sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Rumus Perhitungan AKI

$$\begin{aligned} \text{Persentase capaian} &= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= 94 - (127 - 94) / 94 \times 100 = 64,89\% \end{aligned}$$

b) Rumus Perhitungan AKB

$$\begin{aligned} \text{Persentase capaian} &= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= 7,1 - (11,13 - 7,1) / 7,1 \times 100 = 43,24\% \end{aligned}$$

c) Rumus Perhitungan AKABA

$$\begin{aligned} \text{Persentase capaian} &= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= 8,3 - (12,29 - 8,3) / 8,3 \times 100 = 51,93\% \end{aligned}$$

d) Stunting

$$\begin{aligned} \text{Persentase capaian} &= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= 7,6 - (9,5 - 7,6) / 7,6 \times 100 = 75\% \end{aligned}$$

e) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular

$$\begin{aligned} \text{Persentase capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= 129,20 / 95 \times 100 = 136\% \end{aligned}$$

f) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &\text{Target} \\ &= 86,50/69 \times 100 = 125,36\% \end{aligned}$$

g) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan

$$\begin{aligned} \text{Persentase capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= 70,5/45 \times 100 = 156,67\% \end{aligned}$$

h) Nilai SAKIP = NA

Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian Kinerja (%)	Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi			
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 Kelahiran Hidup	94	127,58	64,89	Rendah	Bidang Kesmas
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,1	11,13	43,24	Sangat rendah	Bidang Kesmas
	Angka Kematian Balita(AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 Kelahiran Hidup	8,3	12,29	51,93	Rendah	Bidang Kesmas
	Persentase Stunting	%	7,6	9,5	75	Sedang	Bidang Kesmas
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	95	129,20	136	Sangat tinggi	Bidang Yankes dan P2
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian	%	69	86,50	125,36	Sangat tinggi	Bidang Yankes dan P2

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian Kinerja (%)	Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi			
	Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa						
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	45	70,5	156,67	Sangat tinggi	Bidang Mutu
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Poin	77	N/A	N/A		

Berdasarkan tabel 3.8, hasil pengukuran kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Angka Kematian Ibu tahun 2024 tercapai sebesar 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dari target 94 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 11 kasus yang juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7 kasus di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target, adapun capaian kinerja pada indikator AKI sebesar 64,89% dan termasuk kategori capaian kinerja **Rendah**.
- b) Angka Kematian Bayi tahun 2024 tercapai sebesar 11,13 per 1.000 kelahiran hidup dari target 7,1 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2024 meningkat dari 95 kasus di tahun 2023 menjadi 96 kasus di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target. Adapun capaian kinerja pada indikator AKB sebesar 43,24% dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Rendah**.
- c) Angka Kematian Balita tahun 2024 tercapai sebesar 12,29 per 1.000 kelahiran hidup dari target 8,3 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun dari perhitungan AKBa mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari jumlah kasus turun jika dibandingkan tahun 2023, yaitu 115 kasus di tahun 2023 menjadi 106 kasus di tahun 2024. Namun karena jumlah kelahiran hidup turun di tahun 2024 sehingga secara perhitungan angka menjadi naik karena pembagi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target. Adapun capaian kinerja pada Indikator AKBa sebesar 51,93% dan termasuk kategori capaian kinerja **Rendah**.

- d) Persentase Stunting tahun 2024 tercapai sebesar 9,5 % dari target 7,6%, dengan jumlah kasus sebanyak 4.139 anak. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target. Adapun persentase capaian sebesar 75% dan termasuk kategori capaian kinerja **Sedang**.
- e) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular terealisasi 129,20% dari target ≥ 95 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target. Adapun persentase capaian kinerja sebesar 136% dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.
- f) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa tahun 2024 terealisasi sebesar 86,50% dari target sebesar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target. Adapun persentase capaian kinerja sebesar 125 % dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.
- g) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan tahun 2024 terealisasi sebesar 70% dari target 45%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target. Adapun persentase capaian kinerja sebesar 156 % dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.
- h) Nilai Sakip tahun 2024 N/A karena belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Daerah.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel. 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%
Menurunnya Angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 Kelahiran Hidup	96	111,59	83,76	95	68,31	128,09	94	127,58	64,89
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per1000 Kelahiran Hidup	7,3	6,23	114,66	7,2	9,27	71,25	7,1	11,13	43,24
	Angka Kematian Balita(AKBa) per1000 Kelahiran hidup.	per1000 Kelahiran hidup.	8,5	7,99	106	8,4	11,22	66,43	8,3	12,29	51,93
	Persentase Stunting	%	7,7	8,1	103,85	7,7	7	109,09	7,6	9,5	75
	Ketercapaian upaya pencegah an Dan pengenda lian Penyakit Menular	%	95	100	100	95	100	100	95	129,20	136
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	64	70,07	109,48	66	88,93	100	69	86,50	125,36
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	27	22,6	83,70	36	44	100	45	70,5	156,67

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	poin	75	78,37	100	76	96,18	126,55	77	N/A	N/A

Keterangan:

T : Target

R : Realisasi

%: Persentase Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel 3.9, pengukuran kinerja IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Menurunnya angka kesakitan dan kematian, yang diukur dengan :

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup dan terealisasi 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 64,89%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 128,09 % capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 63,2%.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,1 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 11,13 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 43,24%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 71,25% capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 28,01%.

c) Angka Kematian Balita (AKABA)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 8,3 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 12,29 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 51,93%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 66,43%, capaian tahun

2024 mengalami penurunan 14,5% .Stunting

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,6% terealisasi 9,5% dengan capaian kinerja 75%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 109,09%, capaian tahun 2024 mengalami penurunan 34,09%.

- d) Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 95% terealisasi 129,20% dengan persentase capaian sebesar 136%, Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 36%.

- e) Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 69% terealisasi 86,50% dengan capaian kinerja 125,36%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan 25,36%.

- f) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 45% terealisasi 70,5% dengan capaian kinerja 156,6%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%, capaian di tahun 2024 mengalami peningkatan 56,67% .

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik, yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah 77 poin, namun untuk tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun target tahun 2023 sebesar 76 terealisasi sebesar 96,18 dengan capaian 126,55%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100% sehingga capaian di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 26,55%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
Menurunnya Angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 Kelahiran Hidup	94	127,58	64,89	92	64,13
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per1000 Kelahiran Hidup	7,1	11,13	43,24	6,9	41,59
	Angka Kematian Balita (AKBa) per1000 Kelahiran hidup.	per1000 Kelahiran hidup.	8,3	12,29	51,93	8,1	50,74
	Persentase Stunting	%	7,6	9,5	75	7,5	74,67
	Ketercapaian upaya pencegahan Dan pengendalian Penyakit Menular	%	95	129,20	136%	>95	136
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	69	86,50	125,36%	75	115
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	45	70,5	156,66%	65	108,46
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	Poin	77	N/A	N/A	80	N/A

Berdasarkan tabel 3.10, perbandingan capaian kinerja tahun

2024 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Menurunnya angka kesakitan dan kematian, yang diukur dengan :

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup dan terealisasi 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja 64,89%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase capaian kinerja sebesar 64,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **Rendah**.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,1 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 11,13 per 1000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja 43,24%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase capaian kinerja sebesar 41,59%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **Sangat Rendah**.

c) Angka Kematian Balita (AKABA)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 8,3 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 12,29 per 1000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja 51,93 %. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase capaian kinerja sebesar 50,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **Rendah**.

d) Persentase Stunting

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,6% terealisasi 9,5% dengan persentase capaian kinerja sebesar 75%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase capaian kinerja sebesar 74,67%. Hal ini menunjukkan bahwa

kinerja pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **Sedang**.

- e) Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 95% terealisasi 129,20% dengan persentase capaian kinerja 136%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase capaian kinerja sebesar 136%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

- f) Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 69% terealisasi 86,50% dengan persentase capaian kinerja sebesar 125,36%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase capaian kinerja sebesar 115%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

- g) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 45% terealisasi 70,5%. dengan capaian kinerja 156%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase capaian kinerja sebesar 108,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik, yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 77 poin, namun belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Daerah.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Kabupaten Lain

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Sukoharjo			Kab. Sragen		Kab.Wonogiri	
			T	R	%	R	%	R	%
Menurunnya Angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	94	127,58	64,89	167,08	22,26	59,59	136,61
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 KH	7,1	11,13	43,24	13,36	11,83	9,31	68,87
	Angka Kematian Balita(AKBa) per1000 Kelahiran hidup.	Per 1000 KH.	8,3	12,29	51,93	0,93	188,80	9,68	83,37
	Persentase Stunting	%	7,6	9,5	75	11,66	46,58	9,63	69,74

Keterangan:

T : Target

R : Realisasi

?: Persentase Capaian Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.11, perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup dan terealisasi 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja 64,89%. Capaian ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen, dimana AKI Kabupaten Sragen mencapai 167,08. Namun lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Wonogiri dengan AKI sebesar 59,59.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,1 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 11,13 per 1000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja 43,24%. Capaian ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen, dimana AKB Kabupaten Sragen mencapai 167,08. Namun lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Wonogiri dengan AKI sebesar 59,59.

c) Angka Kematian Balita (AKABA)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 8,3 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 12,29 per 1000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja 51,93 %. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen dan Wonogiri , AKABA di Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi.

d) Persentase Stunting

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,6% terealisasi 9,5% dengan persentase capaian kinerja sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen dan Wonogiri persentase stunting Sukoharjo masih lebih rendah, dimana Kabupaten Sragen persentase stunting berdasarkan data e-PPGBM mencapai 11,66% sedangkan Kabupaten Wonogiri 9,63%.

Tiga indikator sasaran strategis 1 yaitu **Menurunnya Angka Kesakitan Dan Kematian** yang lain tidak dapat dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, karena perbedaan indikator yang digunakan. Sedangkan untuk nilai SAKIP tidak dapat dibandingkan karena belum dilakukan penilaian untuk nilai tahun 2024.

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target Nasional

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Nasional	% Capaian
			T	R	%		

Menurunnya Angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 Kelahiran Hidup	94	127,58	64,89	183	130,60
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per1000 Kelahiran Hidup	7,1	11,13	43,24	16	130,44
	Persentase Stunting	%	7,6	9,5	75	14	132,14

Keterangan:

- T : Target
- R : Realisasi
- %: Persentase Capaian Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.12, perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target nasional sebagai berikut :

- a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup terealisasi sebesar 127,58 per 100.000 kelahiran hidup, dengan persentase capaian 64,89% . Sedangkan target nasional sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja Kabupaten Sukoharjo bila dibandingkan target nasional sebesar 130,60. Capaian kasus kematian ibu di Kabupaten Sukoharjo masih dibawah target nasional, dan capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.
- b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,1 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 11,13 per 1000 kelahiran hidup, dengan persentase capaian sebesar 43,24%. Jika dibandingkan dengan target AKB nasional sebesar 16 per

1.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 130,44 maka Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sukoharjo masih dibawah target nasional dengan capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

c) Stunting

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,6% terealisasi 9,5% dengan persentase capaian sebesar 75%. Jika dibandingkan arget stunting nasional sebesar 14% dengan capaian kinerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 132,14% maka persentase stunting Kabupaten Sukoharjo masih dibawah target nasional dengan capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

5) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian IKU di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus kematian ibu di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebanyak 11 kasus, naik dibanding kematian ibu tahun 2023 sebanyak 7 kasus. Penyebab 11 kasus kematian ibu di tahun 2024 yaitu Pre Eklampsia Berat (PEB) (4 kasus), infeksi (1 kasus), perdarahan (3 kasus) dan penyakit penyerta DM (1 Kasus), Komplikasi non obsteri (2 kasus yaitu : 1 Kasus *Dengue Shock Syndrome* (DSS) dan 1 Kasus gangguan jiwa).

Semua kasus kematian ibu tersebut sudah ditangani oleh Dokter spesialis Obsgyn dan Dokter Internis di Rumah Sakit, namun karena kondisi penyebab kematian seperti PEB atau penyakit penyerta seperti DM dengan komplikasi KPD (Ketuban Pecah Dini) semakin menjadi penyulit bagi ibu dengan adanya kehamilan dan menyebabkan kehamilan sulit dipertahankan. Kasus ini benar-benar sulit ditangani walaupun sudah dirujuk ke Rumah Sakit.

Selain itu ada 3 kasus dengan kehamilan yang tidak

diinginkan (belum menikah) sehingga ibu menyembunyikan kehamilannya dan ANC tidak dapat dilakukan sesuai standar. Kondisi ibu hamil ditemukan dan kontak dengan tenaga kesehatan sudah dalam kondisi kritis dan terlambat dalam tatalaksana. Ada 1 kasus kematian ibu dengan permasalahan administratif dimana kematian masuk dalam kematian di Kabupaten Sukoharjo karena domisili ibu lebih dari 6 bulan di Kabupaten Sukoharjo, namun KTP dan beraktifitas serta pemeriksaan kehamilan di wilayah lintas batas (Surakarta).

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi Umur 0-11 bulan terbagi pada usia Neonatal 0-28 hari dan 29 hari – 11 bulan. Kematian bayi terbanyak adalah pada usia neonatal (0-28 hari) sebanyak 69 kasus yang disebabkan oleh *Disorders related to short gestation and low birth* sebanyak 14 kasus, *Respiratory distress of Newborn* sebanyak 13 kasus, *Congenital Pneumonia* sebanyak 11 kasus, *Bacterial sepsis of Newborn* sebanyak 8 Kasus, *Other infections specific to the perinatal period* sebanyak 7 kasus, *Respiratory and cardiovascular disorders* sebanyak 3 kasus, *Birth Asfiksia* sebanyak 3 kasus, *Neonatal Aspiration Syendromes* sebanyak 2 kasus, *other neonatal conditions* sebanyak 2 kasus, *Pulmonary Haemorrhage perinatal* sebanyak 1 kasus, *Low Birth weight and prematurity* sebanyak 1 kasus, *Intra uterine Hypoksia* sebanyak 1 kasus, *Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities* sebanyak 1 kasus, *anensefalus dan malformasi* sebanyak 1 kasus, *malformasi digestif* sebanyak 1 kasus.

Kondisi kematian kasus diatas 50 kasus diantaranya dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Berat Badan kurang dari 2000 gram. Berat badan sangat rendah mempengaruhi kualitas kesehatan dan bertahanya bayi tersebut, karena dapat berpengaruh pada kualitas bayi dalam bertahan hidup apalagi jika disertai dengan penyakit penyerta.

Kelainan kongenital pada bayi berdampak pada gangguan tumbuh kembang sehingga bayi tidak dapat bertahan hidup karena kondisi kelainan organ, nutrisi dan kematangan organ belum sempurna dengan baik di banding bayi normal. Pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan berat kurang dari 2000 gram juga sering mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menambah komplikasi karena tubuh bayi rentan terhadap infeksi sehingga mudah sakit bahkan sampai pada kematian. Pada bayi dengan asfiksia mengalami gangguan pernafasan yang dapat berpengaruh pada fungsi paru sehingga bayi tidak dapat bertahan hidup.

Kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebanyak 27 kasus dengan penyebab kematian sebagai berikut : Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal sebanyak 6 kasus, Pnemonia sebanyak 5 kasus, Malformasi kongenital sistem sirkulasi sebanyak 2 kasus, penyakit lain pada sistem pernafasan sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 2 kasus, Demam Berdarah sebanyak 1 kasus, Infeksi saluran pernafasan bawah sebanyak 1 kasus, *Cerebral Palsy* dan sindrom lumpuh lainnya sebanyak 1 kasus, Infeksi gastroenteritis dan kolitis sebanyak 1 kasus, infeksi bakteri usus lainnya sebanyak 1 kasus, penyakit radang pada sistem saraf pusat sebanyak 1 kasus, infeksi virus pada sistem saraf pusat sebanyak 1 kasus, pnemonia organisme tidak spesifik sebanyak 1 kasus, Hernia sebanyak 1 kasus, dan sindrom down sebanyak 1 kasus.

Kematian pada usia bayi ini sudah masuk dalam perawatan di Rumah Sakit, yang berarti bayi sakit sudah dalam penanganan medis atau perawatan Rumah Sakit. Bayi sakit karena kondisi penyakit yang sangat berat akan menyebabkan gangguan pada bayi baik organ tubuh, pernafasan dan jantung yang berakibat pada ketidak mampuan bayi bertahan hidup bahkan sampai pada kematian.

Pada tahun 2024, kasus kematian Bayi (0-11 Bulan) jika

dibanding tahun 2023 naik dari 95 kasus menjadi 96 kasus. Jika di hitung dalam angka kematian bayi (AKB) menjadi lebih tinggi dari tahun 2023 (9,27/1000 KH) sedangkan ditahun 2024 (11,13/1000 KH). Hal ini dikarenakan jumlah pembagi dalam perhitungan AKB adalah kelahiran hidup dimana kelahiran hidup ditahun 2024 (8.622 KH) lebih rendah dibanding kelahiran hidup ditahun 2023 (10.246 KH) sehingga AKB ditahun 2024 meningkat.

c) Angka Kematian Balita

Pada tahun 2024 kematian balita umur 0-59 bulan sebanyak 106 kasus, kasus kematian balita adalah kasus kematian komulatif dari angka kematian Neonatal, bayi dan balita. Penyebab kematian balita usia 12-59 bulan sebanyak 10 kasus yaitu Penyakit Infeksi dan parasit sebanyak 2 kasus, penyakit sistem respirasi sebanyak 2 kasus, infeksi dan radang paru-paru sebanyak 2 kasus, Anemia aplastik dan anemia lain sebanyak 1 kasus, ensefalitis, myelitis dan ensepalitis sebanyak 1 kasus, broncopneumonia sebanyak 1 kasus dan infeksi viral dan prion pada sistem saraf pusat sebanyak 1 kasus.

Kondisi sakit berat dengan komplikasi pada balita tersebut menyebabkan gangguan pada balita baik organ tubuh , pernafasan dan jantung yang berakibat pada ketidak mampuan balita bertahan hidup bahkan sampai pada kematian.

Pada tahun 2024, kasus kematian Balita (0-59 Bulan) jika dibanding tahun 2023 menurun dari 115 menjadi 106 kasus, tetapi jika di hitung dalam angka kematian balita (AKABA) menjadi lebih tinggi dari tahun 2023 (11,22/1000 KH) sedangkan ditahun 2024 (12,29/1000 KH). Hal ini dikarenakan jumlah pembagi dalam perhitungan AKABA adalah kelahiran hidup dimana kelahiran hidup ditahun 2024 (8622 KH) lebih rendah dibanding kelahiran hidup ditahun 2023 (10246 KH) sehingga AKABA ditahun 2024 meningkat, dibanding jumlah kasus yang sebenarnya turun di tahun 2024.

d) Persentase Stunting.

Jumlah kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2024 sebanyak 4.139 kasus (9.5%). Angka ini diperoleh berdasarkan hasil penarikan data EPPGBM Desember 2024 yang di entry dalam aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM). Prevalensi stunting di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dimana tahun 2023 angka stunting Kabupaten Sukoharjo mencapai 7% (3.001 kasus).

Meningkatnya kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan jumlah sasaran yang diukur dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.956 balita sedangkan pada tahun 2024 balita yang diukur sejumlah 43.403, parameter yang digunakan yaitu Tinggi Badan menurut umur yang diukur di posyandu oleh kader, oleh karena itu perlu adanya edukasi yang ditujukan kepada kader posyandu dan keluarga balita tentang cara pengukuran tinggi badan dengan benar. Selain itu kerjasama pemantauan serta penyediaan Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting pasca rawat inap maupun rawat jalan antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit berjalan belum optimal. Perlunya edukasi yang lebih lanjut terkait tatalaksana gizai bagi balita stunting, serta perlunya komitmen dari orang tua balita untuk memberikan makanan pada balita sesuai jadwal makan, jenis makanan, serta jumlah makanan yang sesuai dengan usianya.

e) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular tercapai sesuai target dengan capaian kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Melakukan edukasi, penyuluhan, skrining pada masyarakat umum dan populasi kunci serta pengobatan pada penderita HIV. Pada skrining terhadap orang terisiko HIV AIDS (populasi kunci), dari 13.366 target sasaran, telah dilakukan terhadap 13.107 orang (98,1%). Total kasus HIV dilaporkan sebanyak 992 orang, dengan penemuan pada tahun 2024

sebanyak 68 kasus. Sehingga angka prevalensi kasus HIV sebesar 0,11% lebih rendah dari target $\leq 2\%$.

- Pencegahan dan pengendalian TBC dilakukan dengan kegiatan penemuan terduga TBC, penemuan kasus, dan pengobatan terhadap kasus TBC. Penemuan terduga TBC sebanyak 12.398 orang dari target sasaran sebanyak 11.937 orang (103,86%). Penemuan kasus mencapai 70% dari estimasi jumlah kasus ditemukan 2.456 kasus dan, ditemukan sebanyak 1719 orang. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan sebesar 84%.
- Jumlah kasus DBD dilaporkan sebanyak 562 kasus dan kematian sejumlah 9 kasus. Dengan jumlah kasus penduduk Kabupaten Sukoharjo sejumlah 913.950, didapat angka kesakitan DBD sebesar 61,5/100.000 penduduk dan hal ini melebihi dari target yang seharusnya $\leq 49/100.000$ penduduk.
- Kasus Malaria dilaporkan sejumlah 38 kasus dan semua kasus merupakan kasus impor bukan indigeneus. Angka kesakitan malaria 0,04 per 1000 penduduk dan masih dibawah target yaitu <1 per 1000 penduduk.
- KLB tertangani kurang dari 24 jam 100%, KLB tersebut berjumlah 10 Kejadian terdiri keracunan makanan dan pertussis 3 kejadian. Semua KLB tersebut dapat diperhentikan penularan.
- Melakukan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi 0-11 bulan sebesar 10.444 bayi (104%) dan 10.749 bawah dua tahun (111%), imunisasi anak sekolah 12.028 (112,7%), kelas 2 sebanyak 10.925 (90,6%) dan kelas V sebanyak 10.867 anak (90%).
- Sebanyak 828 jemaah haji dilakukan pembinaan kesehatan haji dan dilakukan surveilans K3JH sehingga pada waktu pulang ke tanah air tidak membawa penyakit.

f) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa tercapai sesuai target dengan capaian kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Pengelolaan dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sebanyak 1.815 orang atau 80% dari target sejumlah 2.270 orang.
- Penemuan, pengelolaan dan pelayanan penderita hipertensi mencapai 221.863 orang atau 81,9% dari target, dimana perempuan lebih banyak ditemukan.
- Penemuan, pengelolaan dan pelayanan penderita diabetes militus mencapai 17.568 orang atau 97,5% dari target, dimana perempuan lebih banyak ditemukan.
- Pengelolaan dan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular usia produktif mencapai 545.773 orang atau 93% dari target.

g) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan tercapai sesuai target dengan capaian kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Kondisi data fasyankes sangat dinamis maka perlu dilakukan cut off pada 31 Desember 2024 dengan jumlah total fasyankes sebanyak 122 Unit sebagai target sasaran sebagai berikut :

- ✓ FKTP : 12 Puskesmas dan 76 Klinik Pratama
- ✓ FKTL/FKRTL : 10 RS dan 19 Klinik Utama
- ✓ Fasyankes Lainnya : 4 Labkes dan 1 UTD (PMI)

dan dari target sasaran di atas capaian jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan (terakreditasi) sesuai Indikator Kinerja Utama Renstra adalah sebagai berikut :

- ✓ FKTP : 12 Puskesmas dan 53 Klinik Pratama

terakreditasi, Total 65 unit

- ✓ FKTL/FKRTL : 10 RS dan 8 Klinik Utama terakreditasi, Total 18 unit
- ✓ Fasyankes Lainnya : 2 Labkes dan 1 UTD (PMI) terakreditasi, Total 3 unit

Maka Capaian total Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan (terakreditasi) di tahun 2024 adalah 86 Unit atau jika dibandingkan dengan target sasaran maka didapat cakupannya sebesar 70,5% yang sudah melebihi target Renstra di 2024 yang hanya sebesar 45%.

- Upaya untuk mendukung tercapainya fasilitas kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Monitoring dan evaluasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala;
 - ✓ Pembinaan mutu akreditasi; dan
 - ✓ Workshop peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan.

6) Analisis Keselarasan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat dengan indikator Angka Harapan Hidup, capaian indikator tujuan tersebut di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**, namun capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan yaitu AKI, AKB, AKABA dan stunting termasuk dalam kategori sedang, rendah bahkan sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi sebagai berikut:

- a) Angka Harapan Hidup merupakan angka yang diperoleh melalui pemodelan statistik dengan mempertimbangkan 19 variabel SUSENAS yang pengambilan datanya dilakukan pada tahun berjalan. Di dalamnya tidak hanya berisi variabel

bidang kesehatan saja namun juga variabel lain terkait kualitas perumahan dan sanitasi. Variabel tersebut meliputi:

- Wanita menurut umur perkawinan pertama
- Rata-rata lama diberi ASI anak usia kurang dari 2 Tahun
- Perempuan pernah kawin yang pernah melahirkan menurut penolong kelahiran terakhir
- Penduduk yang berobat jalan selama sebulan yang lalu menurut tempat berobat
- Rumah tangga menurut beberapa indikator kualitas perumahan (semua indikator perumahan)
- Rata-rata luas lantai per kapita rumah tinggal menurut daerah tempat tinggal (m²)
- Rumah tangga dengan Akses Air Layak
- Rumah tangga dengan jamban milik sendiri dilengkapi tangki septik
- Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir
- Angka Kesakitan
- Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam sebulan terakhir
- Persentase penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan dalam sebulan terakhir
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
- Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir
- Persentase penduduk umur 0-59 bulan (balita) yang pernah mendapat imunisasi
- Persentase penduduk umur 0-23 bulan (baduta) yang pernah diberi ASI
- Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah hamil dan umur saat hamil pertama kali
- Persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir

- Persentase bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.5kg (BBLR)

Semua indikator tersebut diatas merupakan indikator output yang berkorelasi dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yaitu:

- Angka Kematian Ibu, berkorelasi dengan variabel :
 - ✓ Wanita menurut umur perkawinan pertama
 - ✓ Perempuan pernah kawin yang pernah melahirkan menurut penolong kelahiran terakhir
 - ✓ Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah hamil dan umur saat hamil pertama kali
 - ✓ Persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir
- Angka Kematian Bayi dan Balita, berkorelasi dengan variabel :
 - ✓ Rata-rata lama diberi ASI anak usia kurang dari 2 Tahun
 - ✓ Persentase penduduk umur 0-59 bulan (balita) yang pernah mendapat imunisasi
 - ✓ Persentase penduduk umur 0-23 bulan (baduta) yang pernah diberi ASI
 - ✓ Persentase bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.5kg (BBLR)
- Prevalensi Stunting, berkorelasi dengan variabel:
 - ✓ Rumah tangga menurut beberapa indikator kualitas perumahan (semua indikator perumahan)
 - ✓ Rata-rata luas lantai per kapita rumah tinggal menurut daerah tempat tinggal (m2)
 - ✓ Rumah tangga dengan Akses Air Layak
 - ✓ Rumah tangga dengan jamban milik sendiri dilengkapi tangki septik
 - ✓ Persentase penduduk umur 0-59 bulan (balita) yang pernah mendapat imunisasi
 - ✓ Persentase penduduk umur 0-23 bulan (baduta) yang pernah diberi ASI

- ✓ Persentase bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.5kg (BBLR)

Dari variabel tersebut di Kabupaten Sukoharjo cakupan ASI eksklusif mengalami peningkatan di tahun 2024. Pada tahun 2024 cakupan ASI eksklusif mencapai 70,74% sedangkan di tahun 2023 hanya mencapai 64,3%. Namun disisi lain juga terdapat peningkatan bayi berat lahir rendah dari 4,59% pada tahun 2023 menjadi 5,35% pada tahun 2024.

Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyaknya variabel yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Variabel eksogen sangat luas cakupannya, meliputi input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (*time lag*) tertentu. Pengaruh variabel tersebut dapat bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain. Sebagai contoh implementasinya, secara umum diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat.

- b) Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sukoharjo sehingga mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu dan didukung dengan capaian *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Sukoharjo yang cukup tinggi yaitu 98,37% sehingga meningkatkan akses kesehatan yang lebih luas terutama pada masyarakat miskin.
- c) Meningkatnya ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian AHH di Kabupaten Sukoharjo tetap berkorelasi dengan capaian IKU Dinas Kesehatan meskipun tidak selalu berbanding lurus dengan angka kematian ibu, bayi, balita maupun prevalensi stunting sehingga butuh intervensi yang lebih spesifik dalam penyelesaian masalah kesehatan tersebut.

3.2 Realisasi Anggaran

a. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2024, didukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus , Dana BLUD, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), maupun Dana Insentif Fiskal , dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel. 3.13 Realisasi Anggaran Program Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	334.485.996.514	314.483.052.549	94,02
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.270.948.988	95.424.353.840	96,13
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.589.607.400	1.486.276.875	93,50
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	607.273.600	568.200.650	93,57
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.363.514.600	1.340.925.085	98,34
TOTAL ANGGARAN		437.317.341.102	413.302.808.999	94,51

Anggaran pendapatan Rp 135.822.935.608 Realisasi Pendapatan
Rp 146.089.414.163 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.14 Anggaran Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.136.406.732	1.380.500.093
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	31.073.000.000	36.922.226.425
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	700.000.000	738.143.500
2	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	- Pendapatan BLUD dari jasa layanan	101.223.773.929	104.630.886.218
	- Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain	1.274.886.656	1.898.303.892
	- Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	414.868.291	519.354.035

Tabel. 3.15. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		334.485.996.514	314.483.052.549	94,02
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000	46.931.000	93,86
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.995.000	99,95
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.250.000	85,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-dan SKPD	5.000.000	4.250.000	85,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.520.000	90,40
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	4.248.000	84,96
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.668.000	98,34
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		157.885.941.000	151.198.504.408	95,76
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	157.012.061.000	150.344.791.608	95,75
	8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	873.880.000	853.712.800	97,69
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		131.400.000	127.915.200	97,35
	9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	11.515.200	76,77
	10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	116.400.000	116.400.000	100,00
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		74.960.000	74.960.000	100,00
	11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54.600.000	54.600.000	100,00
	12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.150.000	3.150.000	100,00
	13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.610.000	13.610.000	100,00
	14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000	100,00
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		660.455.800	579.395.330	87,73
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.214.500	39.905.000	79,47
	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.670.500	78.999.000	95,56
	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	289.318.000	252.016.200	87,11

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.484.800	44.826.000	79,36
	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.728.000	3.454.600	73,07
	20	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.900.000	9.420.000	95,15
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.140.000	150.774.530	90,21
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		20.900.000	20.275.000	97,01
	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000	900.000	100,00
	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.375.000	96,88
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.537.745.900	1.296.856.260	84,33
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.319.900	13.070.433	98,13
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.598.000	477.106.733	95,31
	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.828.000	806.679.094	78,79
H.	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		680.846.216	667.920.550	98,10
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	55.977.500	93,30
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.126.316	116.535.500	98,65
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	60.150.000	57.600.000	95,76

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
		dan Perizinan Alat Besar			
	30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.810.000	48.807.000	99,99
	31	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.869.900	344.140.550	98,64
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.890.000	44.860.000	99,93
I.	Peningkatan pelayanan BLUD		173.443.747.598	160.470.294.801	92,52
	33	Pelayanan BLUD Puskesmas Weru	4.467.761.320	3.279.498.213	73,40
	34	Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu	3.303.547.687	2.510.716.320	76,00
	35	Pelayanan BLUD Puskesmas Tawangsari	5.057.383.687	4.569.269.771	90,35
	36	Pelayanan BLUD Puskesmas Nguter	4.342.388.665	3.235.596.346	74,51
	37	Pelayanan BLUD Puskesmas Sukoharjo	5.107.667.392	4.095.647.164	80,19
	38	Pelayanan BLUD Puskesmas Bendosari	3.388.310.311	2.759.571.556	81,44
	39	Pelayanan BLUD Puskesmas Polokarto	5.854.206.025	4.410.655.592	75,34
	40	Pelayanan BLUD Puskesmas Mojolaban	4.903.802.034	3.960.535.458	80,76
	41	Pelayanan BLUD Puskesmas Grogol	4.908.876.730	4.492.271.772	91,51
	42	Pelayanan BLUD Puskesmas Baki	3.978.393.420	3.597.619.069	90,43
	43	Pelayanan BLUD Puskesmas Gatak	3.465.244.456	3.449.116.785	99,53
	44	Pelayanan BLUD Puskesmas Kartasura	4.421.265.871	3.293.695.290	74,50
	45	Pelayanan BLUD RSUD Ir Soekarno	120.244.900.000	116.816.101.465	97,15
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		99.270.948.988	95.424.353.840	96,13
J.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		26.870.797.891	26.024.191.135	96,85

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	46	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.231.000.000	6.096.654.927	97,84
	47	Pengembangan Puskesmas	3.112.350.000	3.061.135.000	98,35
	48	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.244.291.800	1.029.274.000	82,72
	49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	80.000.000	78.057.000	97,57
	50	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	128.586.000	128.400.000	99,86
	51	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	7.950.000.000	7.779.219.672	97,85
	52	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.795.586.091	7.551.626.736	96,87
	53	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	291.673.000	266.583.800	91,40
	54	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	37.311.000	33.240.000	89,09
K.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		71.608.976.825	68.705.202.605	95,94
	55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.714.800	54.456.900	99,53
	56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK Puskesmas)	680.460.000	657.235.000	96,59

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.278.000	25.069.200	99,17
	58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (BOK Puskesmas)	169.245.000	167.934.000	99,23
	59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	194.956.691	191.504.011	98,23
	60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BOK Puskesmas)	6.850.000	6.850.000	100,00
	61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	354.517.000	338.479.200	95,48
	62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK Puskesmas)	50.625.000	49.417.500	97,61
	63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	485.304.800	453.090.000	93,36
	64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK Puskesmas)	342.478.000	340.488.000	99,42
	65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.160.000	21.083.800	99,64
	66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	295.640.000	290.102.900	98,13
	67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.775.000	12.215.000	95,62
	68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.480.482.540	2.384.906.000	96,15
	69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.300.000	4.300.000	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.610.691.000	2.539.053.150	97,26
	71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK Puskesmas)	29.250.000	29.250.000	100,00
	72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	390.818.000	359.951.000	92,10
	73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK Puskesmas)	19.800.000	12.100.000	61,11
	74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	27.000.000	10.341.200	38,30
	75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.583.378.000	7.187.916.185	94,79
	76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK Puskesmas)	2.300.825.530	2.076.805.750	90,26
	77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.000.000	21.753.450	87,01
	78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.100.000	35.795.400	59,56
	79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (BOK Puskesmas)	67.418.000	67.418.000	100,00
	80	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	337.427.000	310.142.000	91,91
	81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	8.895.000	8.835.000	99,33

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	82	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.705.000	114.999.500	99,39
	83	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (BOK Puskesmas)	404.767.000	369.055.000	91,18
	84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30.560.000	29.858.500	97,70
	85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	43.166.000	41.763.200	96,75
	86	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	955.350.629	799.618.300	83,70
	87	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Puskesmas)	1.765.558.000	1.696.254.075	96,07
	88	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.118.814.160	44.025.494.589	97,58
	89	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	2.680.000	2.646.000	98,73
	90	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	2.206.000	2.144.700	97,22
	91	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	70.500.000	68.671.000	97,41
	92	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.976.209.000	1.767.287.236	89,43
	93	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	199.249.877	143.370.614	71,96
	94	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (BOK Puskesmas)	201.855.000	180.733.212	89,54
	95	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	29.650.000	27.687.626	93,38
	96	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	1.920.000	-	0,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
		dan Pemberian Obat Massal)			
	97	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)(BOK Puskesmas)	4.100.000	300.000	7,32
	98	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12.600.800	11.205.800	88,93
	99	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	724.351.328	587.934.607	81,17
	100	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000	9.000.000	100,00
	101	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (BOK Puskesmas)	84.600.000	84.100.000	99,41
	102	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	31.770.000	31.346.000	98,67
	103	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)(BOK Puskesmas)	3.750.000	2.050.000	54,67
	104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	19.048.000	19.048.000	100,00
	105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (BOK Puskesmas)	157.975.000	153.435.000	97,13
	106	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	109.375.000	108.846.000	99,52
	107	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (BOK Puskesmas)	734.735.000	685.116.000	93,25
	108	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	88.330.000	86.745.000	98,21

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	109	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (BOK Puskesmas)	71.761.670	-	0,00
L.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		791.174.272	694.960.100	87,84
	110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	49.999.800	46.892.800	93,79
	111	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	124.752.400	97.833.500	78,42
	112	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	616.422.072	550.233.800	89,26
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.589.607.400	1.486.276.875	93,50
M.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		75.032.200	73.055.700	97,37
	104	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	75.032.200	73.055.700	97,37
N.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		183.569.000	175.378.559	95,54
	105	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	69.063.000	68.062.674	98,55
	106	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3.660.000	3.654.000	99,84
	107	Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	110.846.000	103.661.885	93,52

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
O.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.331.006.200	1.237.842.616	93,00
	108	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.331.006.200	1.237.842.616	93,00
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		607.273.600	568.200.650	93,57
P.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		114.107.800	104.167.800	91,29
	109	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	114.107.800	104.167.800	91,29
Q.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		259.075.000	241.280.000	93,13
	110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	259.075.000	241.280.000	93,13
R.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah		17.830.000	9.955.000	55,83

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
	111	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	17.830.000	9.955.000	55,83
S.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		216.260.800	212.797.850	98,40
	112	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	216.260.800	212.797.850	98,40
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		1.363.514.600	1.340.925.085	98,34
T.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		362.215.000	356.714.000	98,48
	113	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	362.215.000	356.714.000	98,48
U.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		319.807.000	310.083.800	96,96
	114	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	319.807.000	310.083.800	96,96
V.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		681.492.600	674.127.285	98,92

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
	115	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	441.534.800	436.179.785	98,79
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (BOK Puskesmas)	239.957.800	237.947.500	99,16
		TOTAL	437.317.341.102	413.302.808.999	94,51

b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 94,02%. Untuk menilai efisiensi kinerja, perbandingan capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 3.16. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	100,00%	100,00%							
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	10.000.000	9.995.000	99,95%	0,05%	10.000.000	5.000	Efisien
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.250.000	85,00%	17,65%	5.000.000	750.000	Efisien
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-dan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.250.000	85,00%	17,65%	5.000.000	750.000	Efisien
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.520.000	90,40%	10,62%	5.000.000	480.000	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.248.000	84,96%	17,70%	5.000.000	752.000	Efisien
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	20.000.000	19.668.000	98,34%	1,69%	20.000.000	332.000	Efisien
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		<i>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1452 Orang/bulan	1488 Orang/bulan	102,47%	157.012.061.000	150.344.791.608	95,75%	7,01%	160.890.258.907	10.545.467.299	Efisien
	8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000 Dokumen	6897 dokumen	137,94%	873.880.000	853.712.800	97,69%	41,20%	1.205.430.072	351.717.272	Efisien
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%							
	9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	15.000.000	11.515.200	76,77%	30,26%	15.000.000	3.484.800	Efisien
	10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	116.400.000	116.400.000	100,00%	0,00%	116.400.000	-	Impas
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
	11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	54.600.000	54.600.000	100,00%	0,00%	54.600.000	-	Impas
	12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.150.000	3.150.000	100,00%	0,00%	3.150.000	-	Impas
	13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	13.610.000	13.610.000	100,00%	0,00%	13.610.000	-	Impas
	14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang	100,00%	3.600.000	3.600.000	100,00%	0,00%	3.600.000	-	Impas
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%							
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	50.214.500	39.905.000	79,47%	25,84%	50.214.500	10.309.500	Efisien
	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 paket	5 paket	100,00%	82.670.500	78.999.000	95,56%	4,65%	82.670.500	3.671.500	Efisien
	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	4 paket	100,00%	289.318.000	252.016.200	87,11%	14,80%	289.318.000	37.301.800	Efisien
	18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100,00%	56.484.800	44.826.000	79,36%	26,01%	56.484.800	11.658.800	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	4.728.000	3.454.600	73,07%	36,86%	4.728.000	1.273.400	Efisien
	20	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100,00%	9.900.000	9.420.000	95,15%	5,10%	9.900.000	480.000	Efisien
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	167.140.000	150.774.530	90,21%	10,85%	167.140.000	16.365.470	Efisien
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah											
		<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100,00%							
	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 unit	0 unit	0,00%	900.000	900.000	100,00%	-100,00%	-	- 900.000	Tidak Efisien
	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	20.000.000	19.375.000	96,88%	3,23%	20.000.000	625.000	Efisien
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
		<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100,00%	13.319.900	13.070.433	98,13%	1,91%	13.319.900	249.467	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	500.598.000	477.106.733	95,31%	4,92%	500.598.000	23.491.267	Efisien
	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.023.828.000	806.679.094	78,79%	26,92%	1.023.828.000	217.148.906	Efisien
H.	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%							
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	100,00%	60.000.000	55.977.500	93,30%	7,19%	60.000.000	4.022.500	Efisien
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	15 unit	100,00%	118.126.316	116.535.500	98,65%	1,37%	118.126.316	1.590.816	Efisien
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3 unit	3 unit	100,00%	60.150.000	57.600.000	95,76%	4,43%	60.150.000	2.550.000	Efisien
	30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	69 Unit	98,57%	48.810.000	48.807.000	99,99%	-1,42%	48.112.017	- 694.983	Tidak Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	31	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	348.869.900	344.140.550	98,64%	1,37%	348.869.900	4.729.350	Efisien
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32 unit	71 unit	221,87%	44.890.000	44.860.000	99,93%	122,02%	99.597.443	54.737.443	Efisien
I.	Peningkatan pelayanan BLUD											
		<i>Persentase pelayanan BLUD</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
	33	Pelayanan BLUD Puskesmas Weru	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.467.761.320	3.279.498.213	73,40%	36,23%	4.467.761.320	1.188.263.107	Efisien
	34	Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.303.547.687	2.510.716.320	76,00%	31,58%	3.303.547.687	792.831.367	Efisien
	35	Pelayanan BLUD Puskesmas Tawangsari	12 bulan	12 bulan	100,00%	5.057.383.687	4.569.269.771	90,35%	10,68%	5.057.383.687	488.113.916	Efisien
	36	Pelayanan BLUD Puskesmas Nguter	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.342.388.665	3.235.596.346	74,51%	34,21%	4.342.388.665	1.106.792.319	Efisien
	37	Pelayanan BLUD Puskesmas Sukoharjo	12 bulan	12 bulan	100,00%	5.107.667.392	4.095.647.164	80,19%	24,71%	5.107.667.392	1.012.020.228	Efisien
	38	Pelayanan BLUD Puskesmas Bendosari	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.388.310.311	2.759.571.556	81,44%	22,78%	3.388.310.311	628.738.755	Efisien
	39	Pelayanan BLUD Puskesmas Polokarto	12 bulan	12 bulan	100,00%	5.854.206.025	4.410.655.592	75,34%	32,73%	5.854.206.025	1.443.550.433	Efisien
	40	Pelayanan BLUD Puskesmas Mojolaban	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.903.802.034	3.960.535.458	80,76%	23,82%	4.903.802.034	943.266.576	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	41	Pelayanan BLUD Puskesmas Grogol	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.908.876.730	4.492.271.772	91,51%	9,27%	4.908.876.730	416.604.958	Efisien
	42	Pelayanan BLUD Puskesmas Baki	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.978.393.420	3.597.619.069	90,43%	10,58%	3.978.393.420	380.774.351	Efisien
	43	Pelayanan BLUD Puskesmas Gatak	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.465.244.456	3.449.116.785	99,53%	0,47%	3.465.244.456	16.127.671	Efisien
	44	Pelayanan BLUD Puskesmas Kartasura	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.421.265.871	3.293.695.290	74,50%	34,23%	4.421.265.871	1.127.570.581	Efisien
	45	Pelayanan BLUD RSUD Ir Soekarno	12 bulan	12 bulan	100,00%	120.244.900.000	116.816.101.465	97,15%	2,94%	120.244.900.000	3.428.798.535	Efisien
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	35,00%	35,96%	102,74%							
		Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Bayi	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Ibu	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Capaian UHC	95,00%	98,37%	103,55%							
		Persentase Fasyankes Lainnya Terakreditasi	80,00%	60,00%	75,00%							
		Persentase Fasyankes yang Memberikan Layanan JKN	52,00%	59,00%	113,46%							

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) / RS terakreditasi	78,00%	62,10%	79,62%							
		Persentase FKTP Terakreditasi	32,00%	73,90%	230,94%							
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	84,00%	86,00%	102,38%							
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja	75,00%	100,00%	133,33%							
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	89,00%	100,00%	112,36%							
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Olahraga	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Kesehatan Reproduksi	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Lansia	100,00%	100,00%	100,00%							

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Imunisasi dan Surveilans	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	68,00%	68,00%	100,00%							
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%							
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Program Penyakit Menular	100,00%	100,00%	100,00%							
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100,00%	100,00%	100,00%							
J.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	Persentase Tingkat Ketersediaan Obat dan BMHP		100,00%	100,00%	100,00%							
	45	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	6.231.000.000	6.096.654.927	97,84%	2,20%	6.231.000.000	134.345.073	Efisien
	46	Pengembangan Puskesmas	7 unit	7 unit	100,00%	3.112.350.000	3.061.135.000	98,35%	1,67%	3.112.350.000	51.215.000	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	47	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	1.244.291.800	1.029.274.000	82,72%	20,89%	1.244.291.800	215.017.800	Efisien
	48	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	80.000.000	78.057.000	97,57%	2,49%	80.000.000	1.943.000	Efisien
	49	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 unit	1 unit	100,00%	128.586.000	128.400.000	99,86%	0,14%	128.586.000	186.000	Efisien
	50	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	45 paket	105 paket	233,33%	7.795.586.091	7.551.626.736	96,87%	140,87%	18.189.441.026	10.637.814.290	Efisien
	51	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	480 unit	414 Unit	86,25%	291.673.000	266.583.800	91,40%	-5,63%	251.567.963	- 15.015.838	Tidak Efisien
	52	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	144 paket	144 paket	100,00%	37.311.000	33.240.000	89,09%	12,25%	37.311.000	4.071.000	Efisien
K.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		<i>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi</i>	32,00%	73,90%	230,94%							
		<i>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Terakreditasi</i>	78,00%	62,10%	79,62%							

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		<i>Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Terakreditasi</i>	80,00%	60,00%	75,00%							
		<i>Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya</i>	30,00%	100,00%	333,33%							
		<i>Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Potensi Bencana</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/Kelurahan)</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu</i>	90,00%	84,00%	93,33%							
		<i>Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar</i>	100,00%	98,06%	98,06%							
		<i>Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Desa/Kelurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Imunisasi lanjutan anak SD sederajat</i>	98,00%	98,00%	100,00%							
		<i>Imunisasi dasar lengkap</i>	95,00%	95,00%	100,00%							

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		<i>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</i>	100,00%	96,68%	96,68%							
		<i>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	100,00%	40,00%	40,00%							
		<i>Pelayanan Kesehatan Penderita DM</i>	100,00%	71,00%	71,00%							
		<i>Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Persentase Kunjungan Bayi Baru Lahir</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Persentase Pelayanan Anak Balita</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)</i>	7,00%	5,33%	76,14%							
		<i>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)</i>	10,00%	6,54%	65,40%							

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		<i>Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Gizi</i>	100,00%	100,00%	100,00%							
		<i>Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita</i>	45,00%	100,00%	222,22%							
		<i>Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(b)</i>	81,00%	70,74%	87,33%							
	53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.715 Orang	9.552 Orang	81,53%	789.889.600	766.148.800	96,99%	-15,94%	643.996.991	- 122.151.809	Tidak Efisien
	54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.183 Orang	8.612 Orang	77,00%	194.523.000	193.003.200	99,22%	-22,39%	149.782.710	- 43.220.490	Tidak Efisien
	55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.650 Orang	8.622 Orang	80,95%	201.806.691	198.354.011	98,29%	-17,64%	163.362.516	- 34.991.495	Tidak Efisien
	56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.852 Orang	53.280 Orang	130,42%	405.142.000	387.896.700	95,74%	36,22%	528.386.196	140.489.496	Efisien
	57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	114.670 Orang	114.317 Orang	99,69%	363.638.000	361.571.800	99,43%	0,26%	362.510.722	938.922	Efisien
	58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	580.262 Orang	545.773 Orang	94,05%	21.160.000	21.083.800	99,64%	-5,61%	19.900.980	- 1.182.820	Tidak Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	121.441 Orang	133.562 Orang	109,98%	295.640.000	290.102.900	98,13%	12,08%	325.144.872	35.041.972	Efisien
	60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	263.830 Orang	221.863 Orang	84,09%	12.775.000	12.215.000	95,62%	-12,05%	10.742.498	- 1.472.503	Tidak Efisien
	61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17.547 Orang	17.568 Orang	100,11%	2.480.482.540	2.384.906.000	96,15%	4,12%	2.483.211.071	98.305.071	Efisien
	62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.247 Orang	1.815 Orang	80,77%	4.300.000	4.300.000	100,00%	-19,23%	3.473.110	- 826.890	Tidak Efisien
	63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.242 Orang	12.398 Orang	110,28%	2.639.941.000	2.568.303.150	97,29%	13,36%	2.911.326.935	343.023.785	Efisien
	64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14.791 Orang	13.107 Orang	88,61%	410.618.000	372.051.000	90,61%	-2,20%	363.848.610	- 8.202.390	Tidak Efisien
	65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	27.000.000	10.341.200	38,30%	161,09%	27.000.000	16.658.800	Efisien
	66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	9.884.203.530	9.264.721.935	93,73%	6,69%	9.884.203.530	619.481.595	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	25.000.000	21.753.450	87,01%	14,92%	25.000.000	3.246.550	Efisien
	68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	127.518.000	103.213.400	80,94%	23,55%	127.518.000	24.304.600	Efisien
	69	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	337.427.000	310.142.000	91,91%	8,80%	337.427.000	27.285.000	Efisien
	70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	8.895.000	8.835.000	99,33%	0,68%	8.895.000	60.000	Efisien
	71	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	520.472.000	484.054.500	93,00%	7,52%	520.472.000	36.417.500	Efisien
	72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	660 Orang	660 Orang	100,00%	30.560.000	29.858.500	97,70%	2,35%	30.560.000	701.500	Efisien
	73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	75 Orang	110 Orang	146,66%	43.166.000	41.763.200	96,75%	51,59%	63.307.256	21.544.056	Efisien
	74	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	30 Dokumen	100,00%	2.720.908.629	2.495.872.375	91,73%	9,02%	2.720.908.629	225.036.254	Efisien
	75	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	45.118.814.160	44.025.494.589	97,58%	2,48%	45.118.814.160	1.093.319.571	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	76	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	600 Orang	2.351 Orang	391,83%	2.680.000	2.646.000	98,73%	296,86%	10.501.044	7.855.044	Efisien
	77	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	119 paket	93 paket	78,15%	2.206.000	2.144.700	97,22%	-19,62%	1.723.989	- 420.711	Tidak Efisien
	78	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	70.500.000	68.671.000	97,41%	2,66%	70.500.000	1.829.000	Efisien
	79	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	1.976.209.000	1.767.287.236	89,43%	11,82%	1.976.209.000	208.921.764	Efisien
	80	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	199.249.877	143.370.614	71,96%	38,98%	199.249.877	55.879.263	Efisien
	81	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	74 Unit	86 Unit	116,21%	29.650.000	27.687.626	93,38%	24,45%	34.456.265	6.768.639	Efisien
	82	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan	100,00%	6.020.000	300.000	4,98%	1906,67%	6.020.000	5.720.000	Efisien
	83	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	12.600.800	11.205.800	88,93%	12,45%	12.600.800	1.395.000	Efisien
	84	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	100,00%	724.351.328	587.934.607	81,17%	23,20%	724.351.328	136.416.721	Efisien
	85	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.473 Orang	1.719 Orang	69,51%	93.600.000	93.100.000	99,47%	-30,12%	65.061.360	- 28.038.640	Tidak Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	86	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	142 orang	137 orang	96,47%	35.520.000	33.396.000	94,02%	2,61%	34.266.144	870.144	Efisien
	87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1.000 orang	1.505 orang	150,50%	19.048.000	19.048.000	100,00%	50,50%	28.667.240	9.619.240	Efisien
	88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	157.975.000	153.435.000	97,13%	2,96%	157.975.000	4.540.000	Efisien
	89	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	267.350.000	262.281.000	98,10%	1,93%	267.350.000	5.069.000	Efisien
	90	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	88.330.000	86.745.000	98,21%	1,83%	88.330.000	1.585.000	Efisien
L.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan ijin	100,00%	100,00%	100,00%							
	101	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	57 Unit	43 Unit	75,43%	49.999.800	46.892.800	93,79%	-19,57%	37.714.849	- 9.177.951	Tidak Efisien
	102	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	134 Unit	138 Unit	102,98%	124.752.400	97.833.500	78,42%	31,31%	128.470.022	30.636.522	Efisien

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	103	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	616.422.072	550.233.800	89,26%	12,03%	616.422.072	66.188.272	Efisien
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan											
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	100%	100%	100,00%							
M.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota											
		Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo	90%	100%	111,11%							
	104	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.002 Dokumen	2.569 Dokumen	128,32%	75.032.200	73.055.700	97,37%	31,79%	96.281.319	23.225.619	Efisien
N.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											
		Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk	95%	100%	105,26%							

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		<i>UKP dan UKM sesuai kebutuhan</i>										
	105	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	69.063.000	68.062.674	98,55%	1,47%	69.063.000	1.000.326	Efisien
	106	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	100,00%	3.660.000	3.654.000	99,84%	0,16%	3.660.000	6.000	Efisien
	107	Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	110.846.000	103.661.885	93,52%	6,93%	110.846.000	7.184.115	Efisien
O.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		<i>Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	90%	100%	111,11%							
	108	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	253 Orang	126,50%	1.331.006.200	1.237.842.616	93,00%	36,02%	1.683.722.843	445.880.227	Efisien
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman											

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		<i>Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan</i>	86%	86,09%	100,10%							
P.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											
		Peresentase sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional) memiliki ijin operasional yang masih aktif	100%	92,62%	92,62%							
	109	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	148 Dokumen	180 Dokumen	121,62%	114.107.800	104.167.800	91,29%	33,23%	138.777.906	34.610.106	
Q.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
		<i>Persentase Sarana IRT yang dapat diterbitkan SPPIRT</i>	100%	98,88%	98,88%							

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen	90 Dokumen	100,00%	259.975.000	241.280.000	92,81%	7,75%	259.975.000	18.695.000	Efisien
R.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											
		<i>Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene</i>	100%	100%	100,00%							
	111	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	17.830.000	9.955.000	55,83%	79,11%	17.830.000	7.875.000	Efisien
S.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga											

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		Persentase jumlah sarana IRTP ber SPPIRT yang dibinwas	78%	85,41%	109,50%							
	112	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	257 unit	258 unit	100,38%	216.260.800	212.797.850	98,40%	2,01%	217.082.591	4.284.741	Efisien
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan											
		Persentase Desa siaga aktif mandiri	47%	97%	206,38%							
T.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	58%	58%	100,00%							
	113	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	362.215.000	356.714.000	98,48%	1,54%	362.215.000	5.501.000	Efisien
U.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		<i>Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga</i>	90,00%	97,00%	107,78%							
	114	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	319.807.000	310.083.800	96,96%	3,14%	319.807.000	9.723.200	Efisien
V.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		<i>Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %</i>	92,00%	99,00%	107,61%							
		<i>Persentase Posyandu Aktif Mandiri</i>	58,00%	99,00%	170,69%							
	115	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	681.492.600	674.127.285	98,92%	1,09%	681.492.600	7.365.315	Efisien

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya penting untuk memastikan bahwa Dinas Kesehatan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang hemat, efektif, dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan sumber daya maka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan yang berdampak pada peningkatan kinerja.

Berdasarkan capaian realisasi anggaran dan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, maka dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi= $\frac{(\text{capaian kinerja} \times \text{pagu anggaran}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{Realisasi anggaran}}$

Implementasi perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersaji pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.16. Analisis Efisiensi Sumber Daya

No	Indikator	Tahun 2024						
		Kinerja			Sumber Daya			Tingkat Efisiensi
		T	R	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Harapan Hidup	77,8	78,01	100.26	437.317.341.102	413.302.808.999	94,51	6,09

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 adalah 78,01. Jika dibandingkan dengan target sebesar 77,8 kinerja yang dicapai sebesar 100, 26%. Tingkat efisiensi dihitung dengan membandingkan capaian kinerja dikali pagu anggaran dikurangi realisasi anggaran dengan realisasi anggaran. Pagu anggaran Dinas Kesehatan yang terdiri dari komponen Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD sebesar Rp. 437.317.341.102,- dengan realisasi anggaran Rp. 413.302.808.999,- dengan persentase realisasi sebesar 94,51. Dengan perhitungan menggunakan rumus diatas, diperoleh kesimpulan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Kesehatan telah melakukan efisiensi sebesar 6,09%.

Analisa Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan Realisasi Anggaran, Permasalahan Dan Solusi.

Tabel 3.17 Analisa Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah		100,00%	100,00%	100,00%					
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%					
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja - PD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	10.000.000	9.995.000	99,95%		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.250.000	85,00%		
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.250.000	85,00%		

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.520.000	90,40%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	4.248.000	84,96%	
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	20.000.000	19.668.000	98,34%	
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		<i>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%				
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1452 Orang/bulan	1488 Orang/bulan	102,47%	157.012.061.000	150.344.791.608	95,75%	
	8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000 Dokumen	6897 dokumen	137,94%	873.880.000	853.712.800	97,69%	
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%				
	9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	15.000.000	11.515.200	76,77%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	116.400.000	116.400.000	100,00%		
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%					
	11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	54.600.000	54.600.000	100,00%		
	12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.150.000	3.150.000	100,00%		
	13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	13.610.000	13.610.000	100,00%		
	14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang	100,00%	3.600.000	3.600.000	100,00%		
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%					
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%	50.214.500	39.905.000	79,47%		
	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	5 paket	100,00%	82.670.500	78.999.000	95,56%		

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100,00%	289.318.000	252.016.200	87,11%	
	18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%	56.484.800	44.826.000	79,36%	
	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	4.728.000	3.454.600	73,07%	Menyesuaikan kebutuhan langganan majalah dan surat kabar
	20	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100,00%	9.900.000	9.420.000	95,15%	
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	1 laporan	1 laporan	100,00%	167.140.000	150.774.530	90,21%	
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah									
		<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%				

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0,00%	900.000	900.000	100,00%	Perpindahan sub k dari Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional ke sub k Pengembangan Puskesmas berdasarkan Surat Sekjen Kemendagri Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024	
	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100,00%	20.000.000	19.375.000	96,88%		
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
		<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%				
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100,00%	13.319.900	13.070.433	98,13%	
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00%	500.598.000	477.106.733	95,31%	
	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.023.828.000	806.679.094	78,79%	
H.	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%				
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100,00%	60.000.000	55.977.500	93,30%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	100,00%	118.126.316	116.535.500	98,65%	
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 unit	3 unit	100,00%	60.150.000	57.600.000	95,76%	
	30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	69 Unit	98,57%	48.810.000	48.807.000	99,99%	
	31	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	348.869.900	344.140.550	98,64%	
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	71 unit	221,87%	44.890.000	44.860.000	99,93%	
I.	Peningkatan pelayanan BLUD									
		Persentase pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100,00%	100,00%	100,00%				
	33	Pelayanan BLUD Puskesmas Weru	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Weru	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.467.761.320	3.279.498.213	73,40%	Menyesuaikan kebutuhan belanja BLUD Puskesmas
										Mengoptimalkan Belanja dengan anggaran BLUD Puskesmas

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	34	Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.303.547.687	2.510.716.320	76,00%	
	35	Pelayanan BLUD Puskesmas Tawang Sari	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Tawang Sari	12 bulan	12 bulan	100,00%	5.057.383.687	4.569.269.771	90,35%	
	36	Pelayanan BLUD Puskesmas Nguter	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Nguter	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.342.388.665	3.235.596.346	74,51%	Menyesuaikan kebutuhan belanja BLUD Puskesmas
	37	Pelayanan BLUD Puskesmas Sukoharjo	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Sukoharjo	12 bulan	12 bulan	100,00%	5.107.667.392	4.095.647.164	80,19%	
	38	Pelayanan BLUD Puskesmas Bendosari	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Bendosari	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.388.310.311	2.759.571.556	81,44%	
	39	Pelayanan BLUD Puskesmas Polokarto	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Polokarto	12 bulan	12 bulan	100,00%	5.854.206.025	4.410.655.592	75,34%	
	40	Pelayanan BLUD Puskesmas Mojolaban	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Mojolaban	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.903.802.034	3.960.535.458	80,76%	
	41	Pelayanan BLUD Puskesmas Grogol	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Grogol	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.908.876.730	4.492.271.772	91,51%	
	42	Pelayanan BLUD Puskesmas Baki	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Baki	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.978.393.420	3.597.619.069	90,43%	
	43	Pelayanan BLUD Puskesmas Gatak	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Gatak	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.465.244.456	3.449.116.785	99,53%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	44	Pelayanan BLUD Puskesmas Kartasura	Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas Kartasura	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.421.265.871	3.293.695.290	74,50%	Menyesuaikan kebutuhan belanja BLUD Puskesmas	Mengoptimalkan Belanja dengan anggaran BLUD Puskesmas
	45	Pelayanan BLUD RSUD Ir Soekarno	Operasional Pelayanan BLUD RSUD Ir. Soekarno	12 bulan	12 bulan	100,00%	120.244.900.000	116.816.101.465	97,15%		
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	35,00%	35,96%	102,74%					
		Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Bayi	Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Bayi	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Ibu	Persentase Cakupan Puskesmas dengan Peningkatan Kesehatan Ibu	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Capaian UHC	Persentase Capaian UHC	95,00%	98,37%	103,55%					
		Persentase Fasyankes Lainnya Terakreditasi	Persentase Fasyankes Lainnya Terakreditasi	80,00%	60,00%	75,00%					
		Persentase Fasyankes yang Memberikan Layanan JKN	Persentase Fasyankes yang Memberikan Layanan JKN	52,00%	59,00%	113,46%					
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) / RS terakreditasi	Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) / RS terakreditasi	78,00%	62,10%	79,62%					
		Persentase FKTP Terakreditasi	Persentase FKTP Terakreditasi	32,00%	73,90%	230,94%					

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	84,00%	86,00%	102,38%				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja	Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja	75,00%	100,00%	133,33%				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	89,00%	100,00%	112,36%				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Olahraga	Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Olahraga	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Kesehatan Reproduksi	Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Kesehatan Reproduksi	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Lansia	Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Lansia	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Puskesmas dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Imunisasi dan Surveilans	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Imunisasi dan Surveilans	100,00%	100,00%	100,00%				

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	68,00%	68,00%	100,00%				
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Program Penyakit Menular	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Program Penyakit Menular	100,00%	100,00%	100,00%				
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100,00%	100,00%	100,00%				
J.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase Tingkat Ketersediaan Obat dan BMHP		100,00%	100,00%	100,00%				
	45	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	1 unit	100,00%	6.231.000.000	6.096.654.927	97,84%	
	46	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 unit	7 unit	100,00%	3.112.350.000	3.061.135.000	98,35%	
	47	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	2 unit	100,00%	1.244.291.800	1.029.274.000	82,72%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	48	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya.	1 unit	1 unit	100,00%	80.000.000	78.057.000	97,57%	
	49	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	100,00%	128.586.000	128.400.000	99,86%	
	50	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai dan Vaksin yang Disediakan	45 paket	105 paket	233,33%	7.795.586.091	7.551.626.736	96,87%	
	51	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	480 unit	414 Unit	86,25%	291.673.000	266.583.800	91,40%	
	52	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta obat, bmhp, vaksin, reagen ke Puskesmas	144 paket	144 paket	100,00%	37.311.000	33.240.000	89,09%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
K.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi	32,00%	73,90%	230,94%				
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Terakreditasi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Terakreditasi	78,00%	62,10%	79,62%				
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Terakreditasi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Terakreditasi	80,00%	60,00%	75,00%				
		Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	30,00%	100,00%	333,33%				
		Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Potensi Bencana	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Potensi Bencana	100,00%	100,00%	100,00%				
		Capaian Universal Health Coverage (UCL Desa/Kelurahan)	Capaian Universal Health Coverage (UCL Desa/Kelurahan)	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	90,00%	84,00%	93,33%				
		Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	100,00%	98,06%	98,06%				

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
		Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	100,00%	100,00%	100,00%				
		Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	100,00%	100,00%	100,00%				
		Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	98,00%	98,00%	100,00%				
		Imunisasi dasar lengkap	Imunisasi dasar lengkap	95,00%	95,00%	100,00%				
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00%	96,68%	96,68%				
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00%	40,00%	40,00%				
		Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100,00%	71,00%	71,00%				
		Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100,00%	100,00%	100,00%				

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
		Persentase Kunjungan Bayi Baru Lahir	Persentase Kunjungan Bayi Baru Lahir	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Pelayanan Anak Balita	Persentase Pelayanan Anak Balita	100,00%	100,00%	100,00%					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100,00%	100,00%	100,00%					
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	7,00%	5,33%	76,14%					
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	10,00%	6,54%	65,40%					
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Gizi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Gizi	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	45,00%	100,00%	222,22%					
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	81,00%	70,74%	87,33%					
	53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.715 Orang	9.552 Orang	81,53%	789.889.600	766.148.800	96,99%		
	54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.183 Orang	8.612 Orang	77,00%	194.523.000	193.003.200	99,22%		

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.650 Orang	8.622 Orang	80,95%	201.806.691	198.354.011	98,29%		
	56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.852 Orang	53.280 Orang	130,42%	405.142.000	387.896.700	95,74%		
	57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114.670 Orang	114.317 Orang	99,69%	363.638.000	361.571.800	99,43%		
	58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580.262 Orang	545.773 Orang	94,05%	21.160.000	21.083.800	99,64%		
	59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121.441 Orang	133.562 Orang	109,98%	295.640.000	290.102.900	98,13%		
	60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	263.830 Orang	221.863 Orang	84,09%	12.775.000	12.215.000	95,62%		
	61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.547 Orang	17.568 Orang	100,11%	2.480.482.540	2.384.906.000	96,15%		

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.247 Orang	1.815 Orang	80,77%	4.300.000	4.300.000	100,00%		
	63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.242 Orang	12.398 Orang	110,28%	2.639.941.000	2.568.303.150	97,29%		
	64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14.791 Orang	13.107 Orang	88,61%	410.618.000	372.051.000	90,61%		
	65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	27.000.000	10.341.200	38,30%	Bencana yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 termasuk rendah sehingga kegiatan pelayanan kesehatan akibat bencana pada tahun 2024 hanya sebanyak 4 kasus kebakaran dan 1 kasus KLB	Mengevaluasi kembali perencanaan yang akan datang

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	9.884.203.530	9.264.721.935	93,73%	
	67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	25.000.000	21.753.450	87,01%	
	68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	127.518.000	103.213.400	80,94%	1. Biaya pemeriksaan eksternal uji kualitas air minum tidak dapat diserap karena pembayaran jasa kepada labkesda yang merupakan UPT dibawah Dinas Kesehatan tidak dapat dilakukan. 2. Efisiensi biaya pengelolaan sampah medis/pemusnahan obat kadaluarsa volume lebih kecil dari yang diperkirakan.
	69	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	337.427.000	310.142.000	91,91%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	8.895.000	8.835.000	99,33%	
	71	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	520.472.000	484.054.500	93,00%	
	72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	660 Orang	660 Orang	100,00%	30.560.000	29.858.500	97,70%	
	73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang	110 Orang	146,66%	43.166.000	41.763.200	96,75%	
	74	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	30 Dokumen	100,00%	2.720.908.629	2.495.872.375	91,73%	
	75	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	45.118.814.160	44.025.494.589	97,58%	
	76	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	600 Orang	2.351 Orang	391,83%	2.680.000	2.646.000	98,73%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	77	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	119 paket	93 paket	78,15%	2.206.000	2.144.700	97,22%	
	78	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	70.500.000	68.671.000	97,41%	
	79	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	1.976.209.000	1.767.287.236	89,43%	
	80	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	199.249.877	143.370.614	71,96%	Kegiatan terkait akreditasi labkesda yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2024 ditunda pelaksanaannya setelah pindah ke gedung baru. Apabila tetap dilaksanakan di tahun 2024, harus dilakukan penilaian ulang di tahun 2025 karena alamat gedung yang berubah.
	81	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	74 Unit	86 Unit	116,21%	29.650.000	27.687.626	93,38%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	82	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan	100,00%	6.020.000	300.000	4,98%	Tidak ada kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal di masyarakat sehingga anggaran tidak direalisasikan	
	83	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	12.600.800	11.205.800	88,93%		
	84	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	100,00%	724.351.328	587.934.607	81,17%		
	85	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (DKK dan Puskesmas)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.473 Orang	1.719 Orang	69,51%	93.600.000	93.100.000	99,47%	Penemuan terduga TBC sudah mencapai 100%, sehingga realisasi pelayanan kesehatan orang dengan TBC menggambarkan kondisi yang sebenarnya gambaran kasus di lapangan	Penetapan sasaran dengan SK Bupati sehingga lebih mendekati angka riil di lapangan

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	86	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (DKK dan Puskesmas)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	142 orang	137 orang	96,47%	35.520.000	33.396.000	94,02%		
	87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.000 orang	1.505 orang	150,50%	19.048.000	19.048.000	100,00%		
	88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	157.975.000	153.435.000	97,13%		
	89	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	267.350.000	262.281.000	98,10%		
	90	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	88.330.000	86.745.000	98,21%		
L.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		<i>Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan ijin</i>	Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan ijin	100,00%	100,00%	100,00%					
	101	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	57 Unit	43 Unit	75,43%	49.999.800	46.892.800	93,79%		

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	102	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	134 Unit	138 Unit	102,98%	124.752.400	97.833.500	78,42%		
	103	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	616.422.072	550.233.800	89,26%		
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										
		<i>Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)</i>	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	100%	100%	100,00%					
M.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota										
		<i>Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo</i>	Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Sukoharjo	90%	100%	111,11%					
	104	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.002 Dokumen	2.569 Dokumen	128,32%	75.032.200	73.055.700	97,37%		
N.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
		<i>Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM sesuai kebutuhan</i>	Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM sesuai kebutuhan	95%	100%	105,26%				
	105	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	69.063.000	68.062.674	98,55%	
	106	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	100,00%	3.660.000	3.654.000	99,84%	
	107	Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	110.846.000	103.661.885	93,52%	
O.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	90%	100%	111,11%				
	108	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	253 Orang	126,50%	1.331.006.200	1.237.842.616	93,00%	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman									
		Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	86%	86,09%	100,10%				
P.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
		Peresentase sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional) memiliki ijin operasional yang masih aktif	Persentase sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional) memiliki ijin operasional yang masih aktif	100%	92,62%	92,62%				
	109	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	148 Dokumen	180 Dokumen	121,62%	114.107.800	104.167.800	91,29%	
Q.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
		Persentase Sarana IRTP yang dapat diterbitkan SPPIRT	Persentase Sarana IRTP yang dapat diterbitkan SPPIRT	100%	98,88%	98,88%				

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
	110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen	90 Dokumen	100,00%	259.975.000	241.280.000	92,81%	
R.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
		<i>Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene</i>	Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	100%	100%	100,00%				
	111	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	17.830.000	9.955.000	55,83%	Berdasarkan jumlah pengajuan permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM
S.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									Mengevaluasi perencanaan tahun yang akan datang

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
		Persentase jumlah sarana IRTP ber SPPIRT yang dibinwas	Persentase jumlah sarana IRTP ber SPPIRT yang dibinwas	78%	85,41%	109,50%				
	112	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	257 unit	258 unit	100,38%	216.260.800	212.797.850	98,40%	
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									
		Persentase Desa siaga aktif mandiri	Persentase Desa siaga aktif mandiri	47%	97%	206,38%				
T.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	58%	58%	100,00%				
	113	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	362.215.000	356.714.000	98,48%	
U.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Anggaran			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
		<i>Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga</i>	Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	90,00%	97,00%	107,78%					
	114	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	319.807.000	310.083.800	96,96%		
V.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		<i>Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %</i>	Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	92,00%	99,00%	107,61%					
		<i>Persentase Posyandu Aktif Mandiri</i>	Persentase Posyandu Aktif Mandiri	58,00%	99,00%	170,69%					
	115	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DKK dan Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	681.492.600	674.127.285	98,92%		

Rata-rata capaian output Urusan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 adalah sebesar 95,84% dengan realisasi keuangan sebesar 93,39%. Keberhasilan tingkat capaian output tersebut ditunjukkan oleh kegiatan yang telah dapat mencapai target output sebesar 100%, namun masih ada sub kegiatan dengan realisasi keuangan dan realisasi kinerja 0% yaitu pada sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal).

Keberhasilan capaian output tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

a) Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tabel III.2 Capaian Keluaran Urusan Kesehatan Tahun 2024 diatas, beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi anggaran dan kinerja masih dibawah 75 % sebagai berikut :

i. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi output mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 73,06%. Hal tersebut disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan langganan majalah dan surat kabar. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih optimal.

ii. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi output mencapai 0%, sedangkan realisasi keuangan 100%. Hal tersebut disebabkan karena perpindahan sub kegiatan dari Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional ke sub kegiatan Pengembangan Puskesmas berdasarkan Surat

Sekjen Kemendagri Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024. Perubahan anggaran menyesuaikan surat tersebut, dan sudah ada realisasi anggaran pendukung pengadaan di bulan Februari 2024 berupa rapat persiapan pengadaan.

iii. Sub Kegiatan Pelayanan BLUD Puskesmas Weru

Realisasi output mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 73,40%. Hal tersebut disebabkan karena belanja BLUD Puskesmas menyesuaikan kebutuhan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat terserap secara optimal.

iv. Sub Kegiatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nguter

Realisasi output mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 74,51%. Hal tersebut disebabkan karena belanja BLUD Puskesmas menyesuaikan kebutuhan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat terserap secara optimal.

v. Sub Kegiatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kartasura

Realisasi output mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 74,49%. Hal tersebut disebabkan karena belanja BLUD Puskesmas menyesuaikan kebutuhan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan perencanaan,

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat terserap secara optimal.

vi. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Realisasi output mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 38,3%. Hal tersebut disebabkan karena kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 termasuk rendah sehingga kegiatan pelayanan kesehatan akibat bencana pada tahun 2024 hanya sebanyak 4 kasus kebakaran dan 1 kasus KLB dengan output semua penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat terserap secara optimal.

vii. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Realisasi output mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 71,95%. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan terkait akreditasi labkesda yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2024 ditunda pelaksanaannya setelah pindah ke gedung baru. Apabila tetap dilaksanakan di tahun 2024, harus dilakukan penilaian ulang di tahun 2025 karena alamat gedung yang berubah. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat terserap secara optimal.

viii. Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Realisasi output mencapai 0%, sedangkan realisasi keuangan 0%. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 tidak ada kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan pemberian obat massal sehingga kegiatan dan anggaran tidak direalisasikan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat terserap secara optimal.

ix. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis

Realisasi output mencapai 69,5%, sedangkan realisasi keuangan 100%. Hal tersebut disebabkan karena perhitungan target orang dengan tuberkulosis menggunakan angka estimasi berdasarkan data Pusdatin Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2024 penemuan terduga TBC sudah mencapai 100%, sehingga realisasi pelayanan kesehatan orang dengan TBC sebanyak 1.719 orang menggambarkan kondisi yang sebenarnya gambaran kasus di lapangan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah penetapan sasaran dengan SK Bupati sehingga lebih mendekati angka riil di lapangan.

x. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Realisasi output mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 55,83%. Hal tersebut disebabkan

karena kegiatan penerbitan Sertifikat Lain Higiene Sanitasi (SLHS) Tempat Pengolahan Makanan (TPM) berdasarkan jumlah pengajuan pemohon SLHS. Pada tahun 2024, jumlah pemohon SLHS hanya 40 TPM sehingga anggaran tidak terserap maksimal.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran dapat terserap secara optimal.

Dari anggaran Dinas Kesehatan tersebut diatas juga untuk mencapai indikator SPM yang telah menjadi kewenangan Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.17 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SASARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.552	9.552	100,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.612	8.612	100,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.622	8.622	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	40.852	40.852	100,00
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	114.317	114.317	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	545.773	545.773	100,00
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	133.562	133.562	100,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	221.863	221.863	100,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17.568	17.568	100,00
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.815	1.815	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	12.398	12.398	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	13.107	13.107	100,00

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori baik, dengan nilai rata-rata capaian tahun 2024 sebesar 100 %, hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Capaian Pengukuran Kinerja

- Angka Kematian Ibu tahun 2024 tercapai sebesar 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dari target 94 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 11 kasus yang juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7 kasus di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target, adapun capaian kinerja pada indikator AKI sebesar 64,89% dan termasuk kategori capaian kinerja **Rendah**.
- Angka Kematian Bayi tahun 2024 tercapai sebesar 11,13 per 1.000 kelahiran hidup dari target 7,1 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2024 meningkat dari 95 kasus di tahun 2023 menjadi 96 kasus di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target. Adapun capaian kinerja pada indikator AKB sebesar 43,24% dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Rendah**.
- Angka Kematian Balita tahun 2024 tercapai sebesar 12,29 per 1.000 kelahiran hidup dari target 8,3 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun dari perhitungan AKBa mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari jumlah kasus turun jika dibandingkan tahun 2023, yaitu 115 kasus di tahun 2023 menjadi 106 kasus di tahun 2024. Namun karena jumlah kelahiran hidup turun di tahun 2024 sehingga secara perhitungan angka menjadi naik karena pembagi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target. Adapun capaian kinerja pada Indikator AKBa sebesar 51,93% dan termasuk kategori capaian kinerja **Rendah**.

- Persentase Stunting tahun 2024 tercapai sebesar 9,5 % dari target 7,6%, dengan jumlah kasus sebanyak 4.139 anak. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah dari target. Adapun persentase capaian sebesar 75% dan termasuk kategori capaian kinerja **Sedang**.
- Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular terealisasi 129,20% dari target ≥ 95 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target. Adapun persentase capaian kinerja sebesar 136% dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.
- Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa tahun 2024 terealisasi sebesar 86,50% dari target sebesar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target. Adapun persentase capaian kinerja sebesar sebesar 125 % dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan tahun 2024 terealisasi sebesar 70% dari target 45%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target. Adapun persentase capaian kinerja sebesar sebesar 156 % dan termasuk kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.
- Nilai Sakip tahun 2024 N/A karena belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Daerah.

2. Capaian Anggaran

Target anggaran sebesar Rp. 437.317.341.102,00 terealisasi Rp. 413.302.808.999,00 persentase capaian sebesar 94,51%.

3. Capaian Pendapatan

Anggaran pendapatan Rp 135.822.935.608 Realisasi Pendapatan Rp 146.089.414.163 persentase capaian 107,55%.

B. Permasalahan atau Kendala yang Terkait dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang di dihadapi dalam pencapaian target sasaran antara lain :

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus kematian ibu di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebanyak 11 kasus, naik dibanding kematian ibu tahun 2023 sebanyak 7 kasus. Penyebab 11 kasus kematian ibu di tahun 2024 yaitu Pre Eklampsia Berat (PEB) (4 kasus), infeksi (1 kasus), perdarahan (3 kasus) dan penyakit penyerta DM (1 Kasus), Komplikasi non obsteri (2 kasus yaitu : 1 Kasus *Dengue Shock Syndrome* (DSS) dan 1 Kasus gangguan jiwa).

Semua kasus kematian ibu tersebut sudah ditangani oleh Dokter spesialis Obsgyn dan Dokter Internis di Rumah Sakit, namun karena kondisi penyebab kematian seperti PEB atau penyakit penyerta seperti DM dengan komplikasi KPD (Ketuban Pecah Dini) semakin menjadi penyulit bagi ibu dengan adanya kehamilan dan menyebabkan kehamilan sulit dipertahankan. Kasus ini benar-benar sulit ditangani walaupun sudah dirujuk ke Rumah Sakit.

Selain itu ada 3 kasus dengan kehamilan yang tidak diinginkan (belum menikah) sehingga ibu menyembunyikan kehamilannya dan ANC tidak dapat dilakukan sesuai standar. Kondisi ibu hamil ditemukan dan kontak dengan tenaga kesehatan sudah dalam kondisi kritis dan terlambat dalam tatalaksana. Ada 1 kasus kematian ibu dengan permasalahan administratif dimana kematian masuk dalam kematian di Kabupaten Sukoharjo karena domisili ibu lebih dari 6 bulan di Kabupaten Sukoharjo, namun KTP dan beraktifitas serta pemeriksaan kehamilan di wilayah lintas batas (Surakarta).

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi Umur 0-11 bulan terbagi pada usia Neonatal 0-28 hari dan 29 hari – 11 bulan. Kematian bayi terbanyak adalah pada usia neonatal (0-28 hari) sebanyak 69 kasus yang disebabkan oleh *Disorders related to short gestation and low birth* sebanyak 14 kasus, *Respiratory distress of Newborn* sebanyak 13 kasus, *Congenital Pneumonia* sebanyak 11 kasus, *Bacterial sepsis of Newborn* sebanyak 8 Kasus, *Other infections specific to the perinatal period* sebanyak 7 kasus, *Respiratory and cardiovascular disorders* sebanyak 3 kasus, *Birth Asfiksia* sebanyak 3 kasus, *Neonatal Aspiration Syendromes* sebanyak 2 kasus, *other neonatal conditions* sebanyak 2 kasus, *Pulmonary Haemorrhage perinatal* sebanyak 1 kasus, *Low Birth weight and prematurity* sebanyak 1 kasus, *Intra uterine Hypoksia* sebanyak 1 kasus, *Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities* sebanyak 1 kasus, *anensefalus dan malformasi* sebanyak 1 kasus, *malformasi digestif* sebanyak 1 kasus.

Kondisi kematian kasus diatas 50 kasus diantaranya dengan BErat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Berat Badan kurang dari 2000 gram. Berat badan sangat rendah mempengaruhi kualitas kesehatan dan bertahanya bayi tersebut, karena dapat berpengaruh pada kualitas bayi dalam bertahan hidup apalagi jika disertai dengan penyakit penyerta. Kelainan kongenital pada bayi berdampak pada gangguan tumbuh kembang sehingga bayi tidak dapat bertahan hidup karena kondisi kelainan organ, nutrisi dan kematangan organ belum sempurna dengan baik di banding bayi normal. Pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan berat kurang dari 2000 gram juga sering mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menambah komplikasi karena tubuh bayi rentan terhadap infeksi sehingga mudah sakit bahkan sampai pada kematian. Pada bayi dengan asfiksia mengalami gangguan pernafasan yang dapat berpengaruh pada fungsi paru sehingga bayi tidak dapat bertahan hidup.

Kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebanyak 27 kasus dengan penyebab kematian sebagai berikut : Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal sebanyak 6 kasus, Pnemonia sebanyak 5 kasus, Malformasi

kongenital sistem sirkulasi sebanyak 2 kasus, penyakit lain pada sistem pernafasan sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 2 kasus, Demam Berdarah sebanyak 1 kasus, Infeksi saluran pernafasan bawah sebanyak 1 kasus, *Cerebral Palsy* dan sindrom lumpuh lainnya sebanyak 1 kasus, Infeksi gastroenteritis dan kolitis sebanyak 1 kasus, infeksi bakteri usus lainnya sebanyak 1 kasus, penyakit radang pada sistem saraf pusat sebanyak 1 kasus, infeksi virus pada sistem saraf pusat sebanyak 1 kasus, pneumonia organisme tidak spesifik sebanyak 1 kasus, Hernia sebanyak 1 kasus, dan sindrom down sebanyak 1 kasus.

Kematian pada usia bayi ini sudah masuk dalam perawatan di Rumah Sakit, yang berarti bayi sakit sudah dalam penanganan medis atau perawatan Rumah Sakit. Bayi sakit karena kondisi penyakit yang sangat berat akan menyebabkan gangguan pada bayi baik organ tubuh, pernafasan dan jantung yang berakibat pada ketidak mampuan bayi bertahan hidup bahkan sampai pada kematian.

Pada tahun 2024, kasus kematian Bayi (0-11 Bulan) jika dibanding tahun 2023 naik dari 95 kasus menjadi 96 kasus. Jika di hitung dalam angka kematian bayi (AKB) menjadi lebih tinggi dari tahun 2023 (9,27/1000 KH) sedangkan ditahun 2024 (11,13/1000 KH). Hal ini dikarenakan jumlah pembagi dalam perhitungan AKB adalah kelahiran hidup dimana kelahiran hidup ditahun 2024 (8.622 KH) lebih rendah dibanding kelahiran hidup ditahun 2023 (10.246 KH) sehingga AKB ditahun 2024 meningkat.

c) Angka Kematian Balita

Pada tahun 2024 kematian balita umur 0-59 bulan sebanyak 106 kasus, kasus kematian balita adalah kasus kematian kumulatif dari angka kematian Neonatal, bayi dan balita. Penyebab kematian balita usia 12-59 bulan sebanyak 10 kasus yaitu Penyakit Infeksi dan parasit sebanyak 2 kasus, penyakit sistem respirasi sebanyak 2 kasus, infeksi dan radang paru-paru sebanyak 2 kasus, Anemia aplastik dan anemia lain sebanyak 1 kasus, ensepalitis, myelitis dan ensepalitis sebanyak 1 kasus, broncopneumonia sebanyak 1 kasus dan infeksi viral dan prion pada sistem saraf pusat sebanyak 1 kasus.

Kondisi sakit berat dengan komplikasi pada balita tersebut menyebabkan gangguan pada balita baik organ tubuh , pernafasan dan jantung yang berakibat pada ketidak mampuan balita bertahan hidup bahkan sampai pada kematian.

Pada tahun 2024, kasus kematian Balita (0-59 Bulan) jika dibanding tahun 2023 menurun dari 115 menjadi 106 kasus, tetapi jika di hitung dalam angka kematian balita (AKABA) menjadi lebih tinggi dari tahun 2023 (11,22/1000 KH) sedangkan ditahun 2024 (12,29/1000 KH). Hal ini dikarenakan jumlah pembagi dalam perhitungan AKABA adalah kelahiran hidup dimana kelahiran hidup ditahun 2024 (8622 KH) lebih rendah dibanding kelahiran hidup ditahun 2023 (10246 KH) sehingga AKABA ditahun 2024 meningkat, dibanding jumlah kasus yang sebenarnya turun di tahun 2024.

d) Persentase Stunting.

Jumlah kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2024 sebanyak 4.139 kasus (9.5%). Angka ini diperoleh berdasarkan hasil penarikan data EPPGBM Desember 2024 yang di entry dalam aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM). Prevalensi stunting di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dimana tahun 2023 angka stunting Kabupaten Sukoharjo mencapai 7% (3.001 kasus).

Meningkatnya kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan jumlah sasaran yang diukur dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.956 balita sedangkan pada tahun 2024 balita yang diukur sejumlah 43.403, parameter yang digunakan yaitu Tinggi Badan menurut umur yang diukur di posyandu oleh kader, oleh karena itu perlu adanya edukasi yang ditujukan kepada kader posyandu dan keluarga balita tentang cara pengukuran tinggi badan dengan benar. Selain itu kerjasama pemantauan serta penyediaan Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting pasca rawat inap maupun rawat jalan antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit berjalan belum optimal. Perlunya edukasi yang lebih lanjut terkait tatalaksana gizi bagi balita stunting, serta perlunya komitmen dari orang tua

balita untuk memberikan makanan pada balita sesuai jadwal makan, jenis makanan, serta jumlah makanan yang sesuai dengan usianya.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan di masa mendatang antara lain :

- 1) Pemeriksaan ibu hamil risiko tinggi oleh dokter SPOG di Puskesmas;
- 2) Audit kasus kematian Maternal dan Perinatal per triwulan;
- 3) Pembelajaran rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP) sebagai tindak lanjut pemetaan kasus dan rekomendasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan status peringkat keadaan yg perlu di evaluasi;
- 4) Meningkatkan koordinasi LS /LP dalam rangka penurunan AKI, AKB, dan stunting;
- 5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun kader kesehatan guna perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
- 6) Promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan di masyarakat agar kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dapat meningkat.

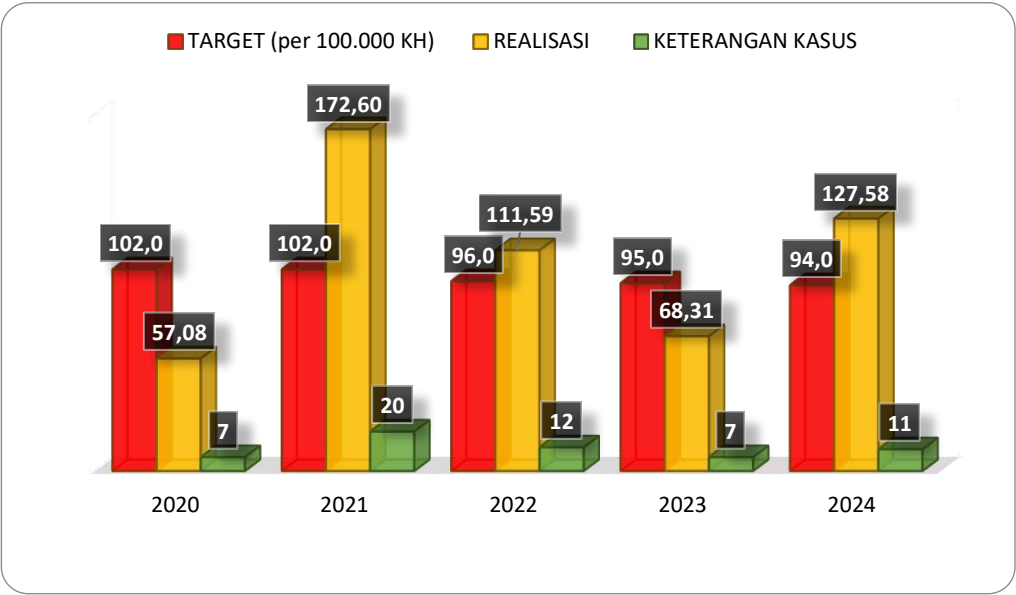
LAMPIRAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DALAM SAJIAN DATA, GRAFIK

1. Data Angka Kematian Ibu (AKI)

NO	TAHUN	TARGET (per 100.000 KH)	REALISASI	KETERANGAN KASUS
1	2020	102,0	57,08	7
2	2021	102,0	172,60	20
3	2022	96,0	111,59	12
4	2023	95,0	68,31	7
5	2024	94,0	127,58	11

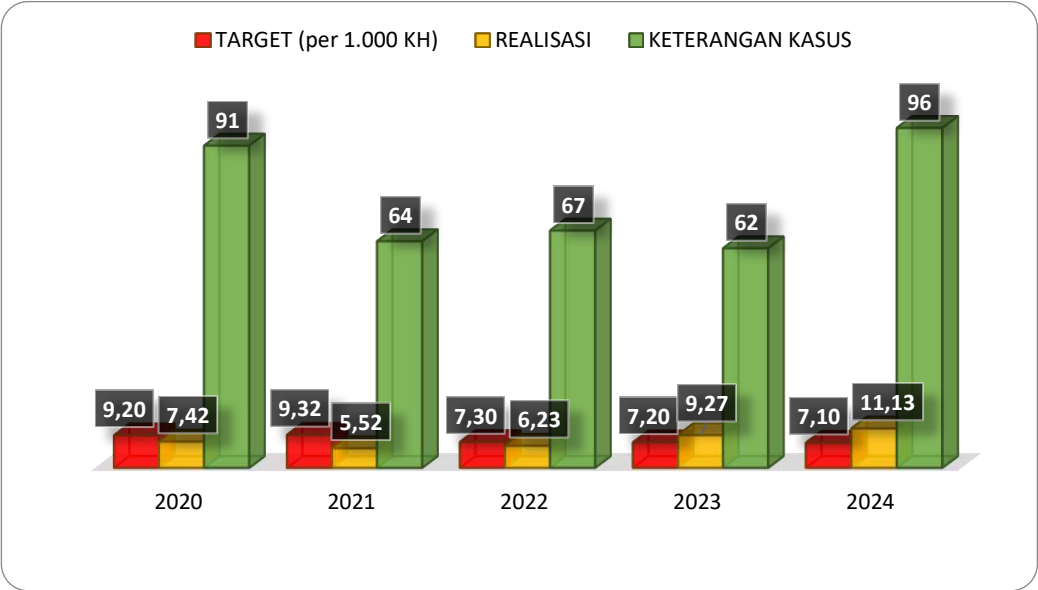
Grafik Angka Kematian Ibu (AKI)



2. Data Angka Kematian Bayi (AKB)

NO	TAHUN	TARGET (per 1.000 KH)	REALISASI	KETERANGAN KASUS
1	2020	9,20	7,42	91
2	2021	9,32	5,52	64
3	2022	7,30	6,23	67
4	2023	7,20	9,27	62
5	2024	7,10	11,13	96

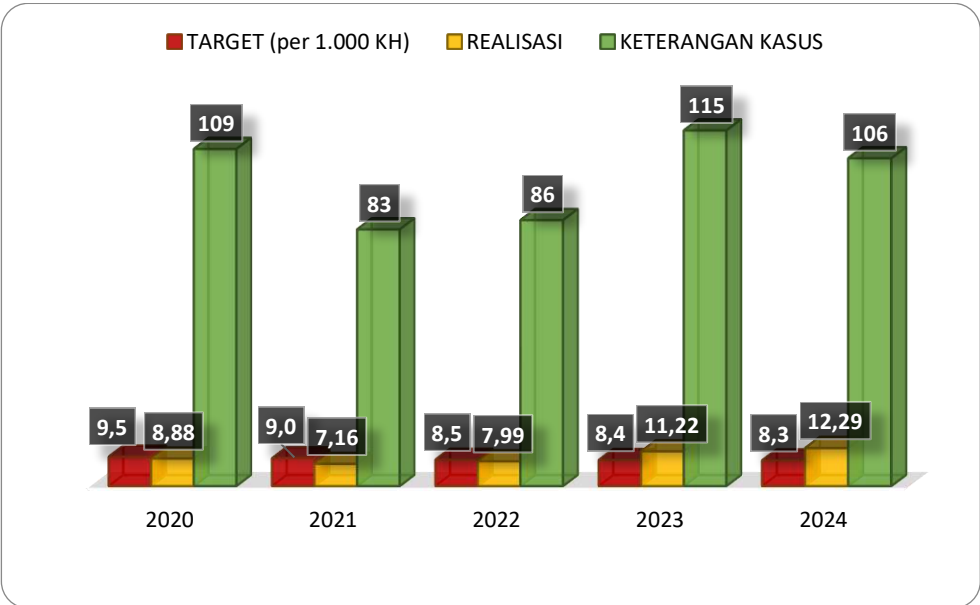
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB)



3. Data Angka Kematian Balita (AKBa)

NO	TAHUN	TARGET (per 1.000 KH)	REALISASI	KETERANGAN KASUS
1	2020	9,5	8,88	109
2	2021	9,0	7,16	83
3	2022	8,5	7,99	86
4	2023	8,4	11,22	115
5	2024	8,3	12,29	106

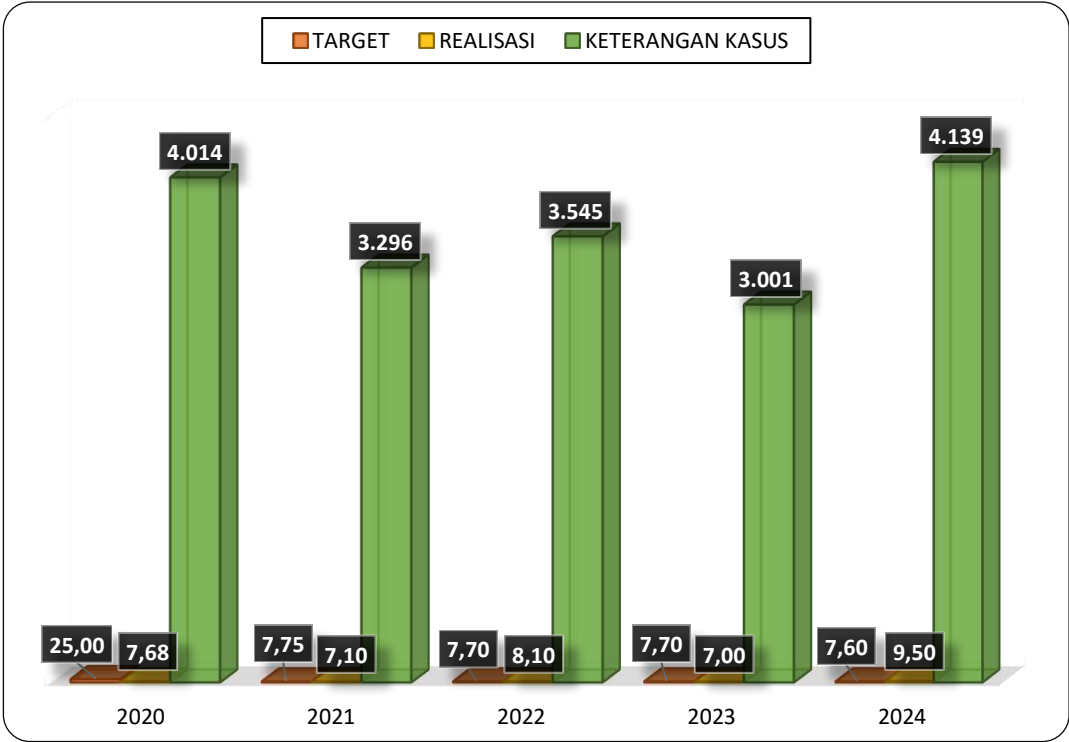
Grafik Angka Kematian Balita (AKBa)



4. Persentase Stunting

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN KASUS
1	2020	25,00	7,68	4.014
2	2021	7,75	7,10	3.296
3	2022	7,70	8,10	3.545
4	2023	7,70	7,00	3.001
5	2024	7,60	9,50	4.139

Grafik



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Pertemuan evaluasi kegiatan anc di pelayanan puskesmas dan bpm/klinik



2. Pertemuan audit kasus kematian ibu dan anak



3. Pertemuan orientasi petugas dalam melaksanakan ante natal care dan post natal care



4. Kegiatan pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil,anc dan stunting



5. Kegiatan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal bagi tenaga kesehatan



6. Pertemuan penguatan pengisian buku kia bagi petugas kesehatan



7. Monitoring Evaluasi kelas ibu hamil dan kelas ibu balita



8. Penguatan pengelolaan hipertensi di fasyankes



9. Penguatan dan edukasi pada penderita diabetes melitus



10. Kegiatan penguatan dan edukasi pada penderita hipertensi



11. Pertemuan kegiatan konvergensi stunting





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI TUTI RAHAYU, SKM,M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj.ETIK SURYANI,SE.,MM

Jabatan : Bupati Sukoharjo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


BUPATI SUKOHARJO
Hj.ETIK SURYANI,SE.,MM


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TRI TUTI RAHAYU, SKM,M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19700902 19910 3 2005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	AKI (Angka Kematian Ibu)	94/100.000KH
		AKB (Angka Kematian Bayi)	7,1/1.000 KH
		AKABA (Angka Kematian Balita)	8,3/1.000 KH
		Persentase Stunting	7,6%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	≥ 95%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	69%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan sesuai ketentuan	45%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	77

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Rp 74.594.964.504,00	APBD/DAK (DKK,RSUD,Puskesmas)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.	Rp 1.589.607.400,00	APBD/ DAK (DKK)
Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.	Rp 607.273.600,00	APBD/ DAK (DKK)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Rp 1.160.254.600,00	APBD/DAK (DKK,Puskesmas)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten.	Urusan Daerah Rp 325.936.993.988,00	APBD/DAK (DKK,BLUD RSUD, BLUD Puskesmas)

JUMLAH ANGGARAN Rp 403.889.094.092,00

Sukoharjo, Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI SUKOHARJO



Hj. ETIK SURYANI, SE., MM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TRI TUTI RAHAYU, SKM, M. Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 19910 3 2005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI TUTI RAHAYU, SKM,M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUS SANTOSA

Jabatan : Plt. Bupati Sukoharjo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua

Plt. BUPATI SUKOHARJO

AGUS SANTOSA

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN
TRI TUTI RAHAYU, SKM,M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19700902 19910 3 2005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya Kesakitan Kematian	Angka dan	
		AKI (Angka Kematian Ibu)	94/100.000KH
		AKB (Angka Kematian Bayi)	7,1/1.000 KH
		AKABA (Angka Kematian Balita)	8,3/1.000 KH
		Persentase Stunting	7,6%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	≥ 95%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	69%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan sesuai ketentuan	45%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	77

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Rp 99.270.948.988,00	APBD/DAK (DKK,RSUD,Puskesmas)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.	Rp 1.589.607.400,00	APBD/ DAK (DKK)
Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.	Rp 607.273.600,00	APBD/ DAK (DKK)
Program Masyarakat Pemberdayaan Bidang Kesehatan.	Rp 1.363.514.600,00	APBD/DAK (DKK,Puskesmas)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten.	Urusan Daerah Rp 331.985.996.514,00	APBD/DAK (DKK,BLUD RSUD, BLUD Puskesmas)
JUMLAH ANGGARAN	Rp 434.817.341.102,00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua



Pit. BUPATI SUKOHARJO



AGUS SANTOSA

Pihak Pertama



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TRI TUTI RAHAYU, SKM, M. Kes

Pembina Tk.I

NIP. 19700902 19910 3 2005



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp. (0271) 593015 Fax (0271) 593561



<https://dkk.sukoharjokab.go.id>



dkk@sukoharjokabgo.id



@dinkes_kab_sukoharjo



@DkkSukoharjo